

**ANALISIS PERBANDINGAN SIKAP INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP  
KEINGINAN TIMOR-LESTE MENJADI ANGGOTA ASEAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

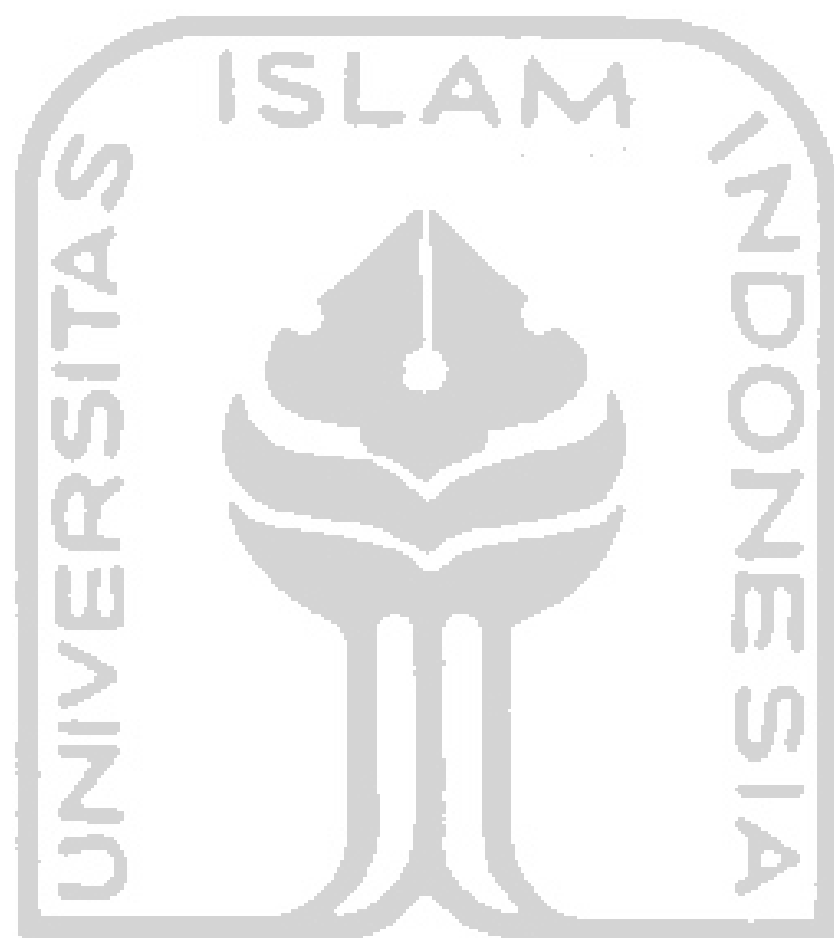
**Gharby Saidi**

**14323084**



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**



جامعة الإسلام في إندونيسيا

**ANALISIS PERBANDINGAN SIKAP INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP  
KEINGINAN TIMOR-LESTE MENJADI ANGGOTA ASEAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Gharby Saidi**

**14323084**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PERBANDINGAN SIKAP INDONESIA DAN SINGAPURA  
TERHADAP KEINGINAN TIMOR LESTE MENJADI ANGGOTA ASEAN**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat

Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

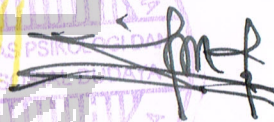
20 September 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

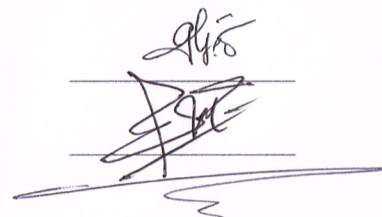
Ketua Program Studi

  
Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
2. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A

Tanda Tangan



## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Gharby Saidi

No. Mahasiswa : 14323084

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Sikap Indonesia Dan Singapura Terhadap Keinginan Timor-Leste Menjadi Anggota ASEAN.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

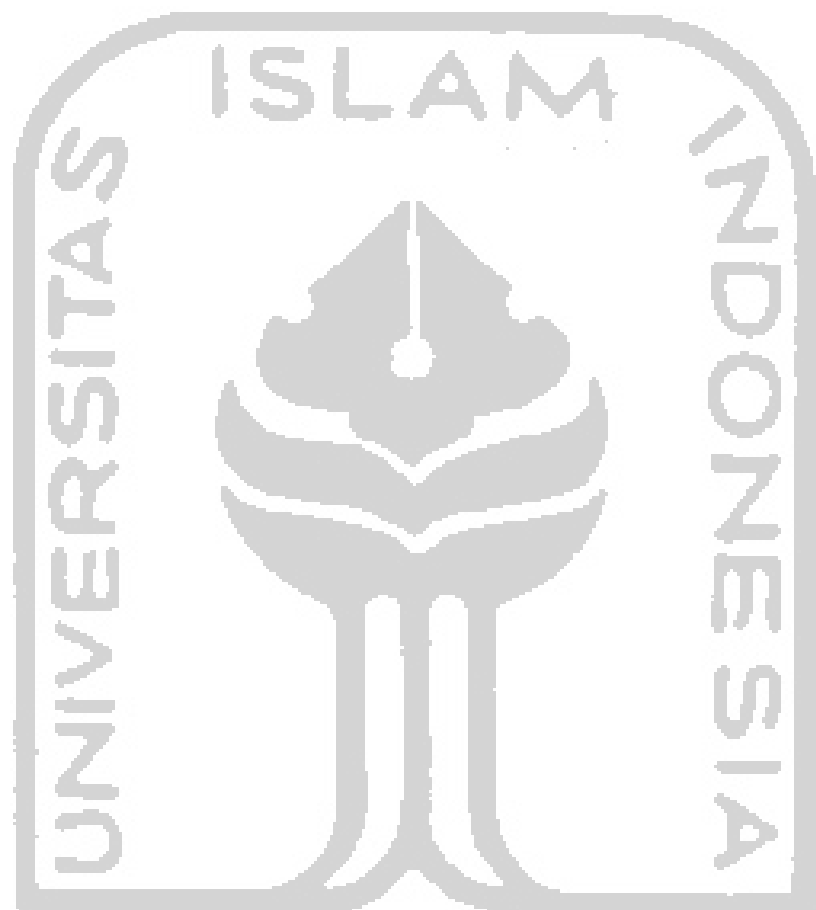
1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 September 2019

Yang menyatakan



Gharby Saidi



جامعة الإسلام في إندونيسيا

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	xiii
<b><u>BAB I PENDAHULUAN.....</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1 Latar Belakang .....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Signifikansi .....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Cakupan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
1.8 Metode Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II PENERIMAAN INDONESIA TERHADAP KEINGINAN TIMOR LESTE BERGABUNG ASEAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Birokrasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Partai Politik .....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Kelompok Yang Berkepentingan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Media Massa.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN .....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Kondisi Ekonomi (Pengeluaran Indonesia).....	Error! Bookmark not defined.
2.3 KEMAMPUAN MILITER INDONESIA .....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer .....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer .....	Error! Bookmark not defined.
2.4 KONTEKS INTERNASIONAL .....	Error! Bookmark not defined.

<b>BAB III PENOLAKAN SINGAPURA TERHADAP KEINGINAN TIMOR LESTE BERGABUNG ASEAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.1. KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.1.1 BIROKRASI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.1.2 Partai Politik .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.1.3 Kelompok Yang Berkepentingan.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.1.4 Media Massa.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.2 KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.2.1 Kondisi Ekonomi.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.3 KEMAMPUAN MILITER SINGAPURA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.3.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.3.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.3.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.4 KONTEKS INTERNASIONAL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.4.1 Indonesia .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.4.2 Amerika Serikat .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.4.3 Australia dan Selandia Baru.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.4.4 China .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.2 SARAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>





## ABSTRAK

Timor Leste telah mengajukan keinginannya untuk bergabung ASEAN sejak 2011. Secara umum, kepentingan nasional Timor Leste di ASEAN adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Dalam hal ekonomi, Timor Leste berkepentingan untuk mengamankan kebutuhan dalam negerinya dengan mencari alternatif produk yang terjangkau dari Negara-negara ASEAN. Produk yang terjangkau akan banyak membantu pemerintah Timor Leste dalam menekan anggaran belanja negaranya per tahun sehingga bisa dialokasikan ke pos lain seperti pendidikan atau kesehatan ataupun untuk membuka lapangan kerja baru. Namun hingga saat ini, keinginan tersebut masih belum dapat diterima di ASEAN. Masih terdapat perbedaan sikap didalam tubuh ASEAN. Negara yang paling terbuka menerima adalah Indonesia, sedangkan negara yang paling menolak adalah Singapura. Perbandingan perbedaan kedua negara tersebut dapat dilihat dari Kondisi Politik dalam Negeri, Kondisi Ekonomi dan Militer dan Konteks Internasional masing-masing dari kedua negara tersebut.

**Kata Kunci:** *Indonesia, Singapura, Timor Leste, ASEAN, Menerima, Menolak*

## ABSTRACT

*Timor Leste has submitted its intention to join ASEAN since 2011. In general, Timor Leste's national interests in ASEAN are economic interests and political interests. In economic terms, East Timor has an interest in securing its domestic needs by finding alternative products that are affordable from ASEAN countries. Affordable products will help the Timor Leste government a lot in suppressing its annual budget so that they can be allocated to other posts such as education or health or to open new jobs. But until now, this desire is still not acceptable in ASEAN. There are still differences in attitudes within the ASEAN body. The country that is most open to accepting is Indonesia, while the country most resisting is Singapore. Comparison of the differences between the two countries can be seen from the Political Conditions in the Country, Economic and Military Conditions and the International Context.*

**Keywords:** *Indonesia, Singapura, Timor Leste, Accepting, Resisting*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

ASEAN, *Association of South East Asian Nations*, adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Semboyannya adalah *One Vision, One Identity, One Community*. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Keanggotaan resmi ASEAN saat ini terdiri dari sepuluh negara setelah keanggotaannya diperluas mencakup Brunei pada (Januari 1984), Vietnam, Laos dan Myanmar pada (Juli 1997), kemudian Kamboja (April 1999) (ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama, 2011).

Prosedur untuk menjadi anggota tetap adalah mengirimkan permohonan secara resmi. Setelah aplikasi keanggotaan tetap disampaikan ke ASEAN *Chair*. Prosedur selanjutnya ditentukan oleh KTT ASEAN atau ASEAN *Summit* dan ASEAN *Coordinating Council*. Setelah semua prosedur dilakukan secara resmi dan ada keputusan dari KTT maka pengajuan aplikasi keanggotaan itu diterima sesuai pasal 6 dalam ASEAN *Charter*. Proses seperti itulah yang dialami oleh negara-negara ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) saat bergabung di akhir tahun 1990-an. Negara-negara menyesuaikan reposisi politik domestik dan penyesuaian politik internasionalnya diselaraskan dengan prinsip dan kebijakan umum ASEAN (Thuzar, 2017).

Secara umum, kepentingan nasional Timor Leste di ASEAN adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Dalam hal ekonomi, Timor Leste

berkepentingan untuk mengamankan kebutuhan dalam negerinya dengan mencari alternatif produk yang terjangkau dari Negara-negara ASEAN ataupun juga partner dagang ASEAN seperti Cina. Produk yang terjangkau akan banyak membantu pemerintah Timor Leste dalam menekan anggaran belanja negaranya per tahun sehingga bisa dialokasikan ke pos lain seperti pendidikan atau kesehatan ataupun untuk membuka lapangan kerja baru.

Asistensi dari Negara-negara ASEAN juga merupakan hal yang dicari Timor Leste dalam rangka membantu Negara itu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh lembaga-lembaga Negara yang demokratis dan patuh hukum. Kedua bidang ini, yakni ekonomi dan politik merupakan tujuan utama mengapa Timor Leste ingin bergabung ke ASEAN. Dalam jangka panjang, apa yang diharapkan oleh Timor Leste terhadap ASEAN adalah stabilitas ekonomi, politik dan juga keamanan dalam negeri yang berikutnya akan mempengaruhi stabilitas kawasan sehingga Timor Leste mampu membangun negaranya dengan lebih baik lagi untuk menjadi Negara yang lebih makmur, sejahtera, adil dan aman dimasa yang akan datang.

Aplikasi pengajuan menjadi anggota resmi Timor Leste diajukan pada 2011 yang langsung diberikan Menteri Timor Leste kala itu, Zacarius Da Costa kepada Menteri Marty Natalegawa yang saat itu mewakili Indonesia setelah pertemuan ke-5 Komisi Bersama Tingkat Menteri RI-Timor Leste pada tahun 2011(Kedubes Indonesia di Ottawa, 2011). Artinya dapat dilihat bahwa Timor Leste dalam mengajukan aplikasi penerimaannya diawali dengan meminta restu dari Indonesia selaku kerabat terdekatnya, tentu hal ini menjadi wajar karena

Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang mana tentu secara kultur hubungan Timor Leste paling dekat dengan Indonesia.

Dukungan Indonesia terhadap upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN memiliki arti penting bagi keberhasilan dan kemajuan Timor Leste. Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Indonesia telah menegaskan dukungannya, demikian pula dengan DPR. Pimpinan DPR saat menerima kunjungan Guterres ke DPR kembali menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung penuh pencalonan Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN. Dukungan dari Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah cukup panjang dengan Timor Leste, jelas mempengaruhi sikap negara anggota ASEAN lainnya (Roza, 2018).

Berbeda dengan sikap Singapura yang menolak aplikasi Timor Leste di ASEAN. Penolakan Singapura sendiri dibenarkan oleh Penasehat ASEAN, Edmund Sim yang mengatakan bahwa *“Basically, 9 of 10 ASEAN member support the immediate start of negotiations for Timor Leste to join ASEAN. Singapore does not”*. Singapura sebagai negara yang mempunyai ekonomi kuat di Asia Tenggara tentu melihat masuknya Timor Leste ditinjau dari segi aspek ekonomi. Dalam Pilar Ekonomi sendiri, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mempercepat produktivitas. Karena untuk mempercepat produktivitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki basis pendidikan umum yang tinggi, memiliki keterampilan yang sesuai yang dapat terus ditingkatkan agar tetap relevan mengikuti perkembangan zaman dan permintaan akan barang dan jasa.

Di dalam proses dan dinamika sejak Timor Leste menawarkan diri bergabung ASEAN, Indonesia menjadi negara yang paling mendukung Timor Leste bergabung ASEAN (Suastha, 2018) dan sebaliknya Singapura menjadi negara yang belum menerima Timor leste untuk bergabung ASEAN karena menilai kondisi domestik negara Timor Leste yang belum siap (Wuryandari). Untuk itulah dalam penelitian ini penulis akan meneliti alasan dan keputusan kedua negara tersebut dalam menilai kelayakan Timor Leste bergabung ASEAN.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan proses Masuknya Timor Leste ke dalam Keanggotaan resmi ASEAN tentu mendapat tanggapan dari anggota resmi ASEAN, dalam konteks ini Indonesia dan Singapura yang diwujudkan dengan perbedaan sikap kedua Negara tersebut. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengkaji **Bagaimana Perbandingan Proses Pembuatan Keputusan Terkait Keinginan Timor Leste Bergabung ASEAN oleh Indonesia dan Singapura.?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat bertujuan untuk :

1. Menganalisis perbandingan sikap Indonesia dan Singapura dalam menentukan aplikasi penerimaan Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN
2. Untuk mengetahui instrumen yang digunakan oleh Indonesia dan Singapura sehingga melandasi perbedaan sikap kedua Negara tersebut.

3. Tulisan ini juga diharapkan mampu menambah sudut pandang kajian dan diskursus tentang Timor Leste yang selama ini minim literturnya.

#### 1.4 Signifikansi

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memberikan analisa dalam terhadap perbedaan sikap Indonesia dan Singapura terkait aplikasi Timor Leste menjadi kenggoataan resmi ASEAN. Artinya status observer yang selama ini menjadi kualifikasi Timor Leste apakah masih relevan ataukah mampu naik tingkat menjadi Anggota Resmi. Kacamata inilah yang ingin peneliti mendalami sehingga mampu dipahami alasan mengapa terjadinya perbedaan sikap Indonesia dan Singapura.

Tulisan ini menjadi menarik karena berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan segala prosesnya tentu barangkali mempengaruhi sikap dari Negara-negara ASEAN dalam menentukan proposal Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota resmi ASEAN, mengingat Timor Leste masih berumur muda sehingga hal tersebut menjadi evaluasi Timor Lester dalam berbenah diri untuk siap bergabung ASEAN.

Penelitian ini menjadi menarik karena sangat minimnya penelitian-penelitian lain yang membahas isu ini. Apalagi dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran tentang perbedaan sikap negara Indonesia dan Singapura dalam menilai proposal Timor Leste bergabung ASEAN. Penulis juga menganalisa kondisi dalam negeri Timor Leste terkait kesiapan negara

tersebut bergabung ASEAN. Dalam proses analisa tersebutlah yang menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan menarik.

## 1.5 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu cakupan penelitian memberikan upaya dalam menentukan konsep atau pendekatan dari suatu permasalahan, sehingga berbagai permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik. Lebih lanjut bahwa pokok permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tentunya harus dibatasi dengan sedemikian rupa.

Hal ini dilakukan agar peneliti mampu menginterpretasikan hasil penelitiannya sesuai dengan pokok permasalahan dan menghindari kerancuan terhadap objek yang diamati. Oleh karena itu ruang lingkup dari penelitian ini yaitu analisa mengenai perbedaan sikap Indonesia dan Singapura terhadap aplikasi Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN. Perbedaan sikap inilah didasari dengan kapabilitas *power* Timor Leste yang ditandai dengan sub-sub bab yang akan penulis sajikan di pembahasan penelitian ini. Maka dari itu pentingnya data-data dari negara Timor Leste sebagai bahan dalam diskursus perbedaan sikap Indonesia dan Singapura.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Secara umum penelitian ini akan memfokuskan pada analisa perbedaan sikap Singapura dan Indonesia dalam menerima proposal bergabungnya Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN. Peneliti berusaha untuk mencoba mengidentifikasi berbagai literature atau kajian-kajian yang membahas keterlibatan kedua negara tersebut, terutama dalam kepentingan dan alasan kedua Negara tersebut dalam menyikapi proposal bergabungnya Timor Leste menjadi anggota tetap ASEAN.

Semangat ini berpengaruh hingga ke di Timor Portugis. Hasrat untuk merdeka rakyat Timor Portugis begitu bergelora, namun berbagai dinamika yang terjadi antara melepaskan diri menjadi Negara berdaulat atau bergabung NKRI maka dibentuklah partai politik untuk mencapai proses tersebut. Partai politik di Timor Portugis ada UDT, ASDT yang kemudian menjelma menjadi Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente), dan terakhir ada Apodeti,. Singkat cerita terjadilah konflik antara UDT fretilin dan Apodeti, perbedaan antara mereka atas tujuan perjuangan mereka adalah penyebab konflik itu, Fretilin ingin merdeka murni, UDT ingin merdeka tetapi tetap menginduk ke Portugis, sedang Apodeti sebagai parpol ingin bergabung dengan Indonesia (Coelho, 2013).

Timor-Leste sudah miskin selama pendudukan Indonesia atas negara itu. Misalnya, antara 31 dan 42 persen penduduk Timor Lorosae memiliki pendapatan di bawah kemiskinan garis pada tahun 1996, dibandingkan dengan rata-rata antara 11 dan 18 persen di Indonesia. Kemiskinan Timor Timur berhubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat buta huruf dan angka kematian yang tinggi, dan akses yang buruk ke perawatan kesehatan dan sosial lainnya. jasa. Timor-Leste berbeda dari sebagian besar wilayah miskin di Asia di mana kemiskinan biasanya terkait dengan tekanan populasi yang terlalu tinggi pada tanah dan



tingginya tingkat ketidak-hadiran. Kemiskinan di Timor-Leste lebih disebabkan oleh buruknya kualitas tanah dan kurangnya akses ke pasar domestik dan internasional (Booth, 2003).

Untuk itu negara yang ingin menjadi anggota ASEAN harus terlebih dahulu menjadi observer atau negara pengamat agar mengetahui mekanisme, prinsip dan nilai yang dijalankan dalam ASEAN. Penetapan keanggotaan di ASEAN dibahas dan disepakati sebagai konsensus bersama dalam sidang tertinggi atau yang dikenal Konferensi Tingkat Tinggi dan diresmikan melalui upacara penerimaan khusus. Mekanisme pengambilan keputusan (konsensus) ini dilakukan agar menjaga solidaritas dan konsensus sebagai permufakatan bersama dalam setiap keputusan karena pada hakikatnya negara anggota ASEAN adalah setara satu sama lain (Frost, 1997).

Aplikasi pengajuan menjadi anggota resmi Timor Leste diajukan pada 2011 yang langsung diberikan Menteri Timor Leste kala itu, Zacarius Da Costa kepada Menteri Marty Natalegawa yang saat itu mewakili Indonesia setelah pertemuan ke-5 Komisi Bersama Tingkat Menteri RI-Timor Leste pada tahun 2011 (Kedubes Indonesia di Ottawa, 2011). Presiden Timor Leste juga mengungkapkan kesungguhannya terkait proposal Timor Leste bergabung dengan ASEAN dengan mengatakan *"we wish to join ASEAN in the possible shortest time"* (Yusoff, 2009).

Artinya dapat dilihat bahwa Timor Leste dalam mengajukan aplikasinya diawali dengan meminta restu dari Indonesia selaku kerabat terdekatnya, tentu hal ini menjadi wajar karena Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang mana tentu secara kultur hubungan Timor Leste paling dekat dengan Indonesia. Hal ini berdampak positif karena Indonesia selalu mendukung Timor Leste untuk bergabung ASEAN (Suastha, 2018).

Namun berbeda dengan Indonesia, menurut Ganewati Wuryandari (Wuryandari) Singapura belum sepenuhnya menerima keanggotaan Timor Leste menjadi anggota ASEAN karena kondisi perekonomian Timor Leste yang lebih rendah di bawah negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV), kekhawatirannya jika menerima Timor Leste justru ASEAN akan melangkah kebelakang padahal ASEAN sedang memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Di antara literatur-literatur belum ada tulisan yang menyajikan dinamika dan analisa proses pengambilan keputusan negara anggota ASEAN dalam menyikapi permohonan Timor Leste bergabung ASEAN, Lebih spesiknya dalam literatur-literatur yang penulis temukan belum ada tulisan yang fokus mengkaji perbedaan-perbedaan sikap negara anggota ASEAN dalam menilai kelayakan Timor Leste ASEAN. Untuk itulah menjadikan penilitan ini menarik sehingga akan memberikan sumbangan yang berharga dalam dialektika akademis.

## 1.7 Landasan Konseptual

### a. *Rational Choice Theory (Decision-Making)*

*Decision making* atau pembuatan keputusan adalah terbagai menjadi dua fungsi yaitu *decision* dan *making*. *Decision* atau keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus secara efisien. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil (Dagun, 2006, p. 185). J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses

mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia (Reason, 1990). Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

Salah satu teori pembuatan keputusan digagas oleh William D. Coplin. Menurut teori tersebut, adalah kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap pengambil kebijakan. Coplin menjelaskan dalam bukunya;

*“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision.... On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in sistem.”* (Azizah, 1992, p. 365).

Penjelasan diatas diatas dapat digambarkan; Pertama, kondisi politik dalam negeri; Kedua, kemampuan ekonomi dan militer; ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Sebagai pertimbangan pertama, kondisi politik dalam negeri meliputi interaksi di antara para aktor yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*), yang terdiri atas birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan massa.

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Coplin menekankan pada tiga indikator. Pertama, peran kelompok kepentingan, partai politik dan birokrat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sistem pengaruh kebijakan dalam suatu negara merupakan interaksi antara para pengambil keputusan dengan para *policy influencers*. Lebih lanjut Coplin menjelaskan, kelompok kepentingan memiliki peran yang lebih besar dalam negara dengan sistem politik yang terbuka seperti Australia. Meskipun demikian, tidak dapat diasumsikan bahwa kelompok kepentingan selalu menjadi penentu utama desain dan arah kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara. Sebaliknya, dalam sebuah negara bersistem politik terbuka juga memungkinkan kelompok kepentingan memiliki peran yang terbatas dalam menggunakan pengaruh. Gambaran yang sama juga terlihat dari peran partai politik dalam Negara bersistem politik terbuka.

Kedua, kekuatan ekonomi dan militer, dapat dipahami bahwa Coplin menekankan beberapa aspek dalam kedua kekuatan tersebut. Pada kekuatan ekonomi, aspek yang dimaksud meliputi perkembangan kondisi ekonomi, kapasitas produksi nasional serta ketergantungan suatu negara pada perdagangan internasional. Sejarah perkembangan kondisi ekonomi dinilai berperan besar dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi luar negeri, khususnya dalam mengukur kapasitas produksi komoditas ekspor. Analisis terhadap kedua aspek ini menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap perdagangan internasional. Pada kekuatan militer, Coplin menekankan peran kapasitas penggunaan kekuatan militer serta ketergantungan keamanan nasional terhadap aktor luar negeri, dimana keduanya dinilai memiliki pengaruh dalam membentuk arah politik luar negeri suatu negara.

Ketiga, memperlihatkan dimensi yang berbeda dari pertimbangan pertama dan kedua. Bila politik dalam negeri dan kekuatan ekonomi serta militer adalah bagian dari dinamika dalam

negeri suatu negara, maka konteks internasional sebagai pertimbangan ketiga merupakan dimensi luar negeri yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri. Sifat konteks internasional yang diwarnai dengan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem internasional menentukan bagaimana suatu negara akan berperilaku. Dalam menjelaskan pertimbangan ini, Coplin menekankan tiga aspek yang terdiri atas aspek geografis, ekonomi dan politik.

Kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politis yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri.

Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk kebijakan atau arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Politik luar negeri sebagai output dari pendekatan Coplin ini mencakup fokus analisis yang luas, dari kebijakan yang terkait dengan hukum dan keamanan internasional hingga kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Lebih mudh, Coplin menegaskan bahwa politik internasional adalah perilaku dan komitmen suatu negara terhadap isu-isu internasional.

Dalam kondisi tersebut, kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional tertentu oleh suatu negara.

Gambar I.1  
Pengambilan Kebijakan



Sumber : (Coplin,1971)

Untuk itu dalam hal ini penelitian, teori *Rational Choice (decision making)* tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan alasan sebuah negara mengeluarkan kebijakan atau keputusan. Dalam konteks penelitian ini Indonesia sebagai aktor negara yang menerima keanggotaan Timor Leste bergabung ASEAN dan Singapura sebagai aktor negara yang menolak keanggotaan Timor Leste bergabung ASEAN, keputusan kedua negara tersebut akan dilihat dari tiga indikator pertimbangan yang ada dalam teori rational

choice yaitu; a.) *Kondisi politik dalam negeri*; b.) *Kondisi ekonomi dan militer*; c.) *Konteks internasional*. Adapun aplikasi tersebut adalah sebagai berikut;

a. *Kondisi Politik Dalam Negeri*

Dalam aspek ini, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan Indonesia untuk melakukan menerima keanggotaan Timor Leste. Adapun aspek politik dalam negeri meliputi kelompok kepentingan, partai politik dan birokat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sehingga penelitian ini akan melihat aspek-aspek kelompok kepentingan, partai politik, birokrat dan media massa yang mendorong bergabungnya Timor Leste ke ASEAN.

b. *Kondisi Ekonomi dan Militer*

Dalam aspek ini, kondisi ekonomi dan militer Indonesia dan Singapura mempengaruhi keputusan kedua negara untuk menerima (Indonesia) dan menolak (Singapura). Dengan demikian hal ini mengharuskan peneliti mencari tahu mengenai kondisi ekonomi dan militer Indonesia pada periode tertentu.

c. *Konteks Internasional*

Aspek konteks Internasional berusaha mempertimbangkan kondisi internasional yang mendorong terjadinya perbedaan Indonesia dan Singapura menilai proposal bergabungnya Timor Leste ke ASEAN.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang kenyataan di antara berbagai faktor atau berbagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai objek penelitian (Casterle, 2012) yaitu Analisis Perbandingan Sikap Indonesia Dan Singapura Terhadap Keinginan Timor-Leste Menjadi Anggota Asean.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Singapura, adapun maksud dari Indonesia dan Singapura sebagai subjek penelitian

Karena kedua negara adalah negara besar di ASEAN dan paling keras menerima dan menolak bergabungnya Timor Leste ke ASEAN. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Timor Leste karena kondisi stabilitas nasional timor leste dan kesiapannya yang menjadi landasan negara Singapura dan Indonesia dalam memberikan sikap

### **3. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan atau studi literatur yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen yang disajikan



dalam buku-buku, jurnal, dan berbagai artikel yang memuat tentang informasi yang juga berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini (Corbin, 1998).

#### 4. Proses Penelitian

Tahap awal dalam menganalisis data adalah pengumpulan data yang telah didapatkan oleh peneliti yang memuat informasi mengenai objek penelitian. Dalam proses pengumpulan data kualitatif adalah data yang berupa perilaku atau fenomena, dan sikap yang diperoleh peneliti. Langkah kedua setelah proses pengumpulan data, penulis mencoba untuk membaca keseluruhan data atau informasi yang bertujuan untuk memahami ide-ide atau gagasan yang tersirat dalam data dan perlu diketahui dalam tahap pengumpulan data, peneliti juga mencatat informasi penting untuk melakukan kategorisasi.

Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah melakukan pemetaan (*coding*) terhadap data-data yang diperoleh penulis, Tahapan ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan reduksi data yang berarti bagian dari kegiatan analisis, sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang diinventaris, mana yang harus dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang dan semua itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis.

Artinya dengan proses tersebut mampu memudahkan penulis untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan proses verifikasi. Langkah keempat yang dilakukan penulis adalah mengembangkan narasi yang didasarkan atas kategorisasi data atau informasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Sekaligus tahap terakhir adalah hasil deskripsi terhadap temuan-temuan yang diperoleh ketika proses pengembangan narasi dan dalam tahap ini peneliti juga mencoba untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai

temuan dari penelitian ini. Dengan sistematika ini penulis berharap dalam proses penelitian dapat berjalan komprehensif dan efisien.



## **BAB II**

### **PENERIMAAN INDONESIA TERHADAP KEINGINAN TIMOR LESTE BERGABUNG ASEAN**

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Pada bab ini tiga faktor tersebut akan penulis elaborasikan dengan sub-sub yang penulis sajikan. Karena Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Apalagi kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politis yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri

Sebagai mantan salah satu provinsi di Indonesia, Timor Leste mempunyai hubungan emosional yang mendalam dengan bangsa Indonesia. Hubungan emosional yang dimaksud adalah kedekatan wilayah, kedekatan suku bangsa yang dimana di daerah perbatasan Indonesia –

Timor Leste memiliki Bahasa daerah yang sama yakni Bahasa “tetun”, perbatasan tersebut meliputi wilayah Atambua, Atapupu, Malaka dan Kefa yang merupakan daratan yang disebut “Pulau Timor”, di tempat inilah yang kemudian banyak ditinggali warga eks Timor Timur. Karena kedekatan wilayah tersebut maka tidak heran jika banyak orang di perbatas yang memiliki keluarga di Timor Leste. Sehingga secara budaya meliki kemiripan.

Disamping faktor budaya dan historis, selama pendudukan Indonesia juga banyak melakukan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia (lengkapnya akan dijelaskan di sub berikut), namun juga selama masa pendudukan oleh Indonesia banyak investasi finansial yang Indonesia gelontorkan bagi Timor Timur (lengkapnya akan dijelasakn di sub bab dibawah), karena banyak investasi yang di gelontorkan maka pendidikan juga bagian dari pada perhatian Indonesia di Timor Leste mengingat kedekatan histori kedua negara dan ditambah lagi semasa pendudukan Indonesia, Bahasa Indonesia juga sudah menjadi Bahasa keseharian rakyat Timor Timur. Dari aspek-aspek diatas lah akan penulis analisis menggunakan Rational Choice Theory (Decision-Making) untuk dibagi menjadi sub bab agar mudah dimengerti argumentasi penulis.

## **2.1 KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA**

Dalam penjelasan ini terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Maka dari itu sesuai teori penulis membagi kedalam empat sub bab, *Pertama*, birokrasi, dalam hal ini melihat aspek dari birokrasi pemerintah Indonesia dalam mendorong menerima keanggotaan Timor Leste; *Kedua* , partai politik, merupakan komponen kedua yang dibahas, dalam hal ini meninjau peran partai politik yang ada di Indonesia dalam menentukan kebijakan ratifikasi; *Ketiga*, kelompok kepentingan, hal ini juga merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas, mengingat hal ini meyangkut mengenai bisnis dan ekonomi.

Dengan demikian akan juga dibahas mengenai kelompok kepentingan terutama kelompok bisnis dan ekonomi; *Keempat*, media massa, dalam peran pemberitaan.

### **2.1.1 Birokrasi**

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 81-2). Dengan demikian maka dalam penerimaan bergabungnya Timor Lest ke ASEAN juga dipengaruhi oleh birokrat dalam hal ini kementerian.

#### **a. Kementerian Luar Negeri**

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN juga berasal dari Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mendapatkan mandat undang-undang untuk mengatur hubungan luar negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar negeri. Menurut peraturan tersebut kementerian ini memiliki delapan fungsi (kemlu, 2019) yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
- h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Dengan melihat mengenai fungsi dari Kementerian Luar Negeri maka diketahui bahwa urusan luar negeri, kemudian urusan diplomasi, negosiasi dan hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri. Dalam konteks penerimaan Timor Leste bergabung ASEAN, Aplikasi pengajuan menjadi anggota resmi Timor Leste diajukan pada 2011 yang langsung diberikan Menteri Timor Leste kala itu, Zacarius Da Costa kepada Menteri Marty Natalegawa yang saat itu mewakili Indonesia setelah pertemuan ke-5 Komisi Bersama Tingkat Menteri RI-Timor Leste pada tahun 2011(Kedubes Indonesia di Ottawa, 2011). Artinya dapat dilihat bahwa Timor Leste dalam mengajukan aplikasi penerimaannya diawali dengan meminta restu dari Indonesia selaku kerabat terdekatnya, tentu hal ini menjadi wajar karena Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang mana tentu secara kultur hubungan Timor Leste paling dekat dengan Indonesia.

Bahkan era Presiden Jokowi (era sekarang), dukungan Indonesia tetap konsisten hingga sekarang, ini terlihat seperti pernyataan Retno Marsudi sebagai berikut;

*“Dukungan untuk Timor Leste yang sudah mengajukan diri sebagai negara anggota ASEAN bukan baru diberikan Indonesia. Sejak awal Indonesia sudah menyampaikan dukungannya, dan pada saat pleno saya sampaikan kembali dukungan Indonesia untuk Timor Leste,”*

Dukungan Indonesia bagi Timor Leste diberikan secara politis dan konkret melalui berbagai bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara tersebut sebelum masuk ASEAN. Sejak mengajukan diri menjadi anggota ASEAN pada 2011, Timor Leste terus berupaya memenuhi sejumlah prasyarat dan keselarasan baik dalam pilar politik, ekonomi, serta sosial budaya.

Bantuan Indonesia dalam menerima Timor Leste tidak hanya sampai disitu, dalam mempersiapkan Timor Leste bergabung ASEAN. Indonesia juga turut serta dalam kerjasama-kerjasama dalam menyiapkan negara tersebut bergabung ASEAN, Kerja seperti pembangunan infraskturktur juga dibantu Indonesia.

### **2.1.2 Partai Politik**

Pada komponen kedua adalah partai politik, dimana menurut William D. Coplin, partai politik merupakan *partisan influencer*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kelompok kedua ini melakukan keberpihakan terhadap aktor politik yang ada dalam hal ini eksekutif. Selain itu partai politik berfungsi dalam menyalurkan tuntutan-tuntunan masyarakat kepada pengambil kebijakan, dengan demikian pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 84-5).

Di dalam konteks ini Anggota DPR kader partai, yang terdiri dari fraksi-fraksi menurut UU No 17 tahun 2014 pasal 82. Maka dari itu karena DPR berasal dari partai politik maka dapat

dikatakan suara anggota DPR merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. Dalam konteks ini ketika Presiden Timor Leste Francisco Guterres bertemu dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) yang juga merupakan kader Golkar dan pimpinan DPR lainnya di DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu DPR menyampaikan dukungannya kepada Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN.

*"Kami akan mendukung Timor Leste menjadi Anggota ASEAN, itu yang paling penting," kata Bamsot saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018). "Kesepakatan atas isu yang penting terhadap batas darat dan batas laut kepada presiden dan beliau menerima dan memberikan apresiasi dan berjanji kedua negara akan membicarakannya pada tingkat yang lebih serius dan lebih cepat,"*

Sementara itu, Guterres menyampaikan kunjungannya ke DPR ini merupakan yang pertama kalinya. Dia menyatakan banyak banyak gagasan dan topik yang ingin dibicarakan. Apalagi jika dilihat dari sejarah kedua negara ini sangat berhubungan erat dan bertetangga secara geografis.

*"Cara kita bergandengan tangan, berjalan bersama untuk masa depan kedua negara dan rakyatnya. Dalam konteks inilah kita akan mengembangkan pemikiran ini, hubungan kerja sama ke depan dan hubungan persahabatan,"*

### **2.1.3 Kelompok Yang Berkepentingan**

Variabel ketiga ini adalah *"interest influencers"* yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 87). Dalam hal ini kelompok yang akan menikmati jika

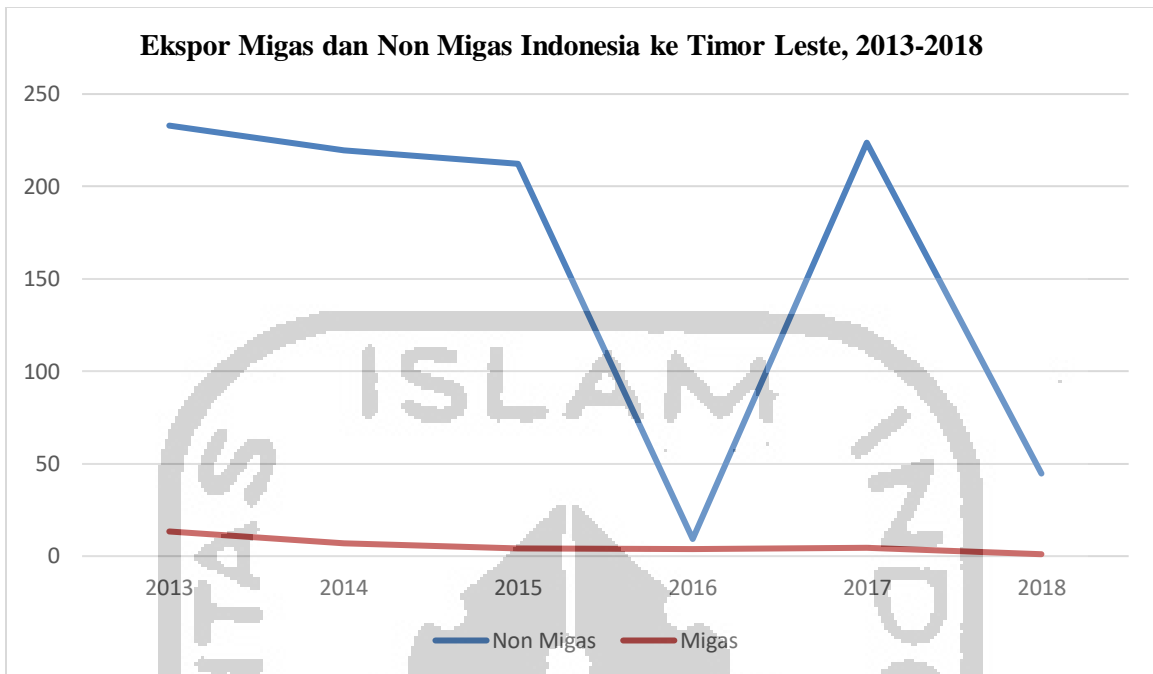


Timor Leste bergabung ASEAN adalah PT Wijaya Karya Tbk Maka kelompok kepentingan yang perlu untuk dijabarkan adalah kelompok penguasa.

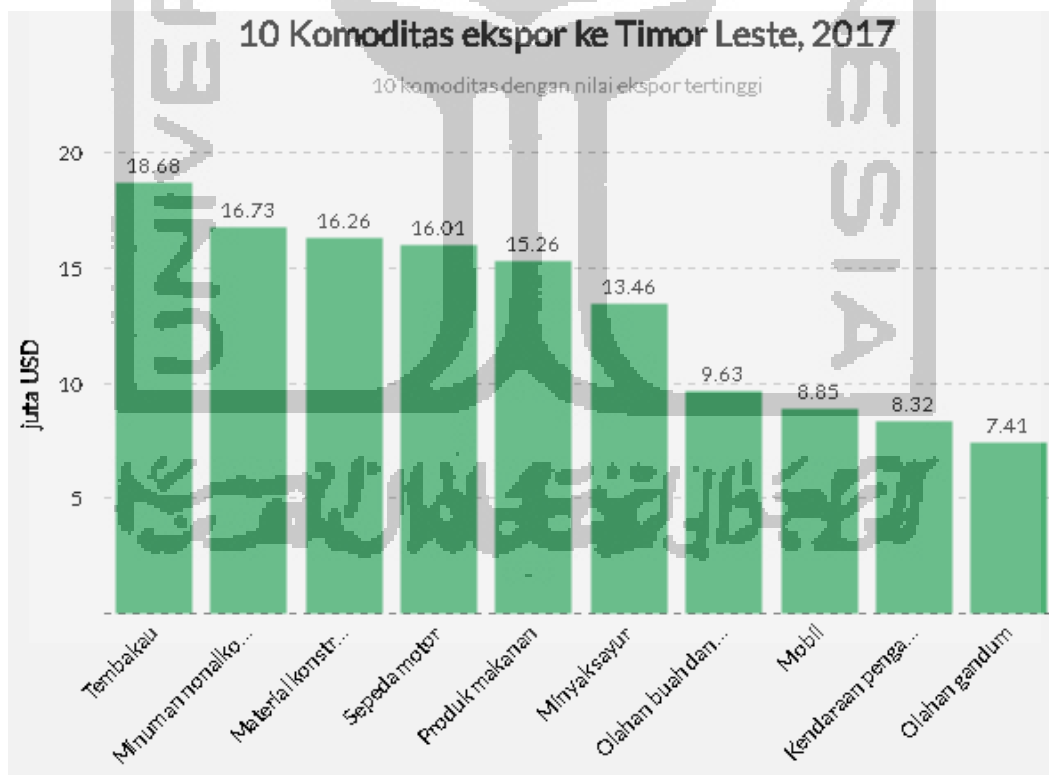
### **Kementerian Badan Usaha Milik Negara (PT. WIKA)**

Sebagai negara yang baru merdeka Timor Leste tentunya membutuhkan impor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kebutuhan dalam negeri tersebut hanya dapat diraih jika Timor Leste menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara mitra strategis Timor Leste. Mitra strategis yang dimaksud adalah negara yang dapat memberi profit bagi Timor Leste secara finansial. Artinya secara geografis dekat dengan Timor Leste sehingga *Coast* atau harga yang dikeluarkan Timor Leste minim. Itulah yang dimaksud dengan mitra strategis. Jika dilihat secara geografis maka Indonesia adalah negara menguntungkan secara finansial bagi Timor Leste.

Dari data Kementrian Perdagangan Indonesia yang diolah penulis menunjukkan, ekspor nonmigas ke Timor Leste berhasil menembus US \$200 juta sejak 2013. Namun, peningkatan tiap tahunnya sangat tipis. Begitu juga dengan ekspor migasnya, Jika dilihat dari periode waktu yang sama, maka kinerja ekspor migas ke Timor terbilang turun. Tahun 2013 mencatatkan waktu tertinggi pencapaian ekspor migas, dengan total nilai perdagangan sebesar US \$13,34 juta. Setelahnya, nilai perdagangan itu cenderung turun, meski tidak drastis (Kementerian Perdagangan, 2019).



Grafik .1 ( data diolah dari (Kementerian Perdagangan, 2019))



Grafik 1.2 (data diambil dari (Kementerian Perdagangan, 2019)).

Dari data yang sama khususnya non-migas, tahun 2017 ekspor Indonesia ke Timor Leste seperti Tembakau nilainya hampir 18,68 juta USD, bahkan ekspor olah gandum (mengingat gandum di Indonesia sendiri tidak dapat tumbuh), ekspor olah gandum ini nilai ekspornya mencapai 7,41 juta USD, apalagi ekspor minyak sayur dan produk makanan masing-masing mencapai 16,01 dan 15,26 juta USD. Artinya dari melihat ini tentu Timor Leste bergantung pada Indonesia untuk memenuhi konsumsi rumah tangganya (Kementerian Perdagangan, 2019). Ketergantungan inilah yang kemudian mengharuskan Timor Leste menjadikan Indonesia sebagai mitra bisnis yang strategis. Apalagi secara geografis Indonesia merupakan negara terdekat dengan Timor Leste yang berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga menggunakan bahasa tetun sebagai bahasa daerah mereka. Persamaan bahasa ini terjadi karena kedekatan geografi dan mobilisasi penduduk yang berpindah dari TTU ke Timor Timur semasa Timor Leste masih menjadi provinsi Indonesia.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Sebagai bangsa muda Timor Leste menghadapi banyak kesulitan, tetapi juga mengharuskan bangsa itu berjuang untuk maju sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Salah satu bidang yang menunjang pengembangan infrastrukturnya. Karena dengan infrastuktur lah yang menunjang roda ekonomi bangsa, dan infrastruktur mendorong modernisasi untuk melancarkan proses aktifitas sebuah negara, dengan jalan dapat menghubungkan jarak yang jauh menjadi dekat karena itulah yang membuka proses ekonomi, dengan didirikan rumah sakit, sekolah, pelabuhan dan bandara maka akan memudahkan pelayanan masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor-Leste saat ini memberikan suara apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara merdeka. Pada akhirnya, 78,5

persen pemilih memberikan suara untuk kemerdekaan. Selama masa ini, kekerasan meletus dan sekitar 70 persen infrastruktur di Timor-Leste hancur. Republik Demokratik Timor-Leste secara resmi menjadi negara berdaulat pada 20 Mei 2002. Sejak itu berdiri, negara tersebut telah bekerja untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Infrastruktur yang rusak dan terbelakang di Timor-Leste adalah salah satu tantangan utama yang sedang dikerjakan negara ini dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Timor-Leste membuat dan merilis rencana strategis yang ingin diselesaikan pada tahun 2030, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan dan standar pendidikan. Termasuk dalam rencana ini adalah seluruh bagian tentang pengembangan infrastruktur negara. Di bagian ini, rencana untuk memperbaiki jalan raya, jembatan, saluran air, teknik sanitasi, listrik, pelabuhan, bandara dan telekomunikasi disusun.

Beberapa tahun lalu, pemerintah Timor-Leste membuka bandara yang bernama Bandara Suai, pada 20 Juni 2017, pembukaan bandara ini menjalin kerja sama dengan BUMN Indonesia PT Wijaya Karya (WIKA) dengan nilai proyeknya US\$ 67 juta. Pembukaan bandara ini termasuk dalam rencana pengembangan strategis dan merupakan contoh dari banyak cara infrastruktur di Timor Leste yang sedang diperbaiki (Nn, Bangga! BUMN RI Garap Proyek Bandara Suai dan Oekusi di Timor Leste, 2017).

Selain pembukaan Bandara Suai, Timor Leste juga membuka Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato yang digarap oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau disebut juga WIKA yang telah resmi merampungkan proyek pembangunan Bandara Internasional Oucusse. Yang berlokasi di Timor Leste pada Selasa, 18 Juni 2019. Pembangunan tersebut menelan nilai kontrak sebanyak US\$119 juta dan dilaksanakan dalam waktu dari 2015 hingga 2018. Dengan melibatkan lebih dari 500 tenaga kerja gabungan, yakni dari Indonesia dan Timor Leste.

Francisco Guterres selaku Presiden Republik Demokratik Timor Leste ikut meresmikan dan mengapresiasi kinerja PT Wijaya Karya dalam proyek pembangunan infrastruktur beserta penunjangnya. Francisco mengatakan, “WKA sebagai (holding) BUMN Indonesia telah berperan besar dalam hubungan (antara) Indonesia-Timor Leste. Baik dalam pembangunan Oecusse maupun negara Timor Leste, kesuksesan ini (nantinya) bakal direplikasi pada distrik-distrik lainnya.” PT Wijaya Karya juga telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur kebandaraan, seperti ComorroBridges 1&2, NataboraBridges, serta Batugade Maliana Road yang berlokasi di satu wilayah dengan Bandara Internasional Oecusse (Nn, PT Wijaya Karya Rampungkan Bandara Oecusse di Timor Leste, 2019).

Sedangkan pada titik lain, PT Wijaya Karya tengah membangun sarana pembangkit energi tenaga diesel yang berlokasi di Loro Sae. Tepatnya terletak di sebelah utara Timor Leste, yakni berjarak sekitar 30 kilometer dari Ibukota Timor Leste, Dili. Serta pembangunan PLTD Betano yang berlokasi di wilayah selatan.

Contoh lain dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Timor-Leste adalah proyek perluasan jalan yang sedang dijalani negara ini. Bank Dunia saat ini membantu untuk mendanai proyek perluasan jalan Timor-Leste. Pada April 2017, kredit \$ 35,2 juta diberikan kepada Timor-Leste dari Bank Dunia untuk memperluas proyek transportasi nasional.

Proyek ini akan membuat jalan raya lebih aman bagi wisatawan dan meningkatkan peluang perjalanan antara bagian utara dan selatan negara itu. Memiliki jalan raya yang dapat diandalkan akan membantu Timor-Leste dalam mengembangkan aspek-aspek infrastruktur lainnya dan mengarah pada peningkatan peluang ekonomi di dalam negara. Jalan raya ini akan mempromosikan pembangunan pedesaan dan mendukung pertumbuhan layanan kesehatan dan pendidikan di Timor-Leste.

Pengembangan infrastruktur di Timor-Leste masih berlangsung, tetapi kemajuan dapat dilihat. Pembukaan bandara kedua dan proyek transportasi utama hanyalah dua contoh pekerjaan yang dilakukan pada infrastruktur di negara ini. Pemerintah Timor-Leste berencana untuk terus membangun kemajuan ini dengan harapan bahwa infrastruktur yang dikembangkan akan meningkatkan standar kehidupan bagi setiap warga negaranya (Stout, 2018).

#### 2.1.4 Media Massa

Variabel keempat adalah Media Massa atau “*mass influencers*”, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis “*framing*” yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

Dalam konteks ini peran media dalam melakukan framing terkait penerimaan Indonesia terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEA merupakan hal yang penting, adapun beberapa pemberitaan di beberapa media online mengenai penerimaan Indonesia sebagai berikut;

No.	Nama Media	Isi	Situs
1.	Detik News	RI akan Terus Dorong Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://news.detik.com/berita/d-4552987/ri-akan-terus-dorong-timor-">https://news.detik.com/berita/d-4552987/ri-akan-terus-dorong-timor-</a>

			<a href="#">leste-jadi-anggota-asean</a>
2.	Republika	Indonesia Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://internasional.republika.co.id/berita/pvjkpz382/indonesia-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean">https://internasional.republika.co.id/berita/pvjkpz382/indonesia-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean</a>
3.	Tempo	Indonesia Diminta Terus Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://nasional.tempo.co/read/1101805/indonesia-diminta-terus-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean/full&amp;view=ok">https://nasional.tempo.co/read/1101805/indonesia-diminta-terus-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean/full&amp;view=ok</a>
4.	Kompas	Satu Negara Keberatan Timor Leste Gabung ASEAN	<a href="https://internasional.kompas.com/read/2011/05/24/13135992/Satu.Negara.Keberatan.Timor.Leste.Gabung.ASEAN">https://internasional.kompas.com/read/2011/05/24/13135992/Satu.Negara.Keberatan.Timor.Leste.Gabung.ASEAN</a>
5.	Cnn Indonesia	Menlu Sebut RI selalu Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180131132539-106-272896/menlu-sebut-ri-selalu-dukung-timor-leste-jadi-anggota-aseanr">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180131132539-106-272896/menlu-sebut-ri-selalu-dukung-timor-leste-jadi-anggota-aseanr</a>
6.	Tribunnews	Ketua DPR Dukung Timor Leste Masuk Anggota ASEAN	<a href="https://www.tribunnews.com/internasional/2018/06/29/ketua-dpr-dukung-timor-leste-masuk-anggota-asean">https://www.tribunnews.com/internasional/2018/06/29/ketua-dpr-dukung-timor-leste-masuk-anggota-asean</a>

(Tabel 1.1)

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media menetapkan framing positif se framing positif sesuai dengan fakta objektif. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan secara netral. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media, karena meskipun urgen bagi pemerintah namun tidak dipandang urgen bagi media di Indonesia.

## **2.2 KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN**

Dalam penejelasan ini terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Maka dari itu sesuai teori penulis menganalisa tentang pengeluaran-pengeluaran Indonesia kepada Timor Leste semasa ankesasi Indonesia. Ini menjadi penting karena mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dan juga menjadi titik balik dalam investasi masa depan.

### **2.2.1 Kondisi Ekonomi (Pengeluaran Indonesia)**

Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. dimana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa Kemampuan ekonomi suatu Negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri Negara itu. (Coplin, 2003, pp. 115-20).

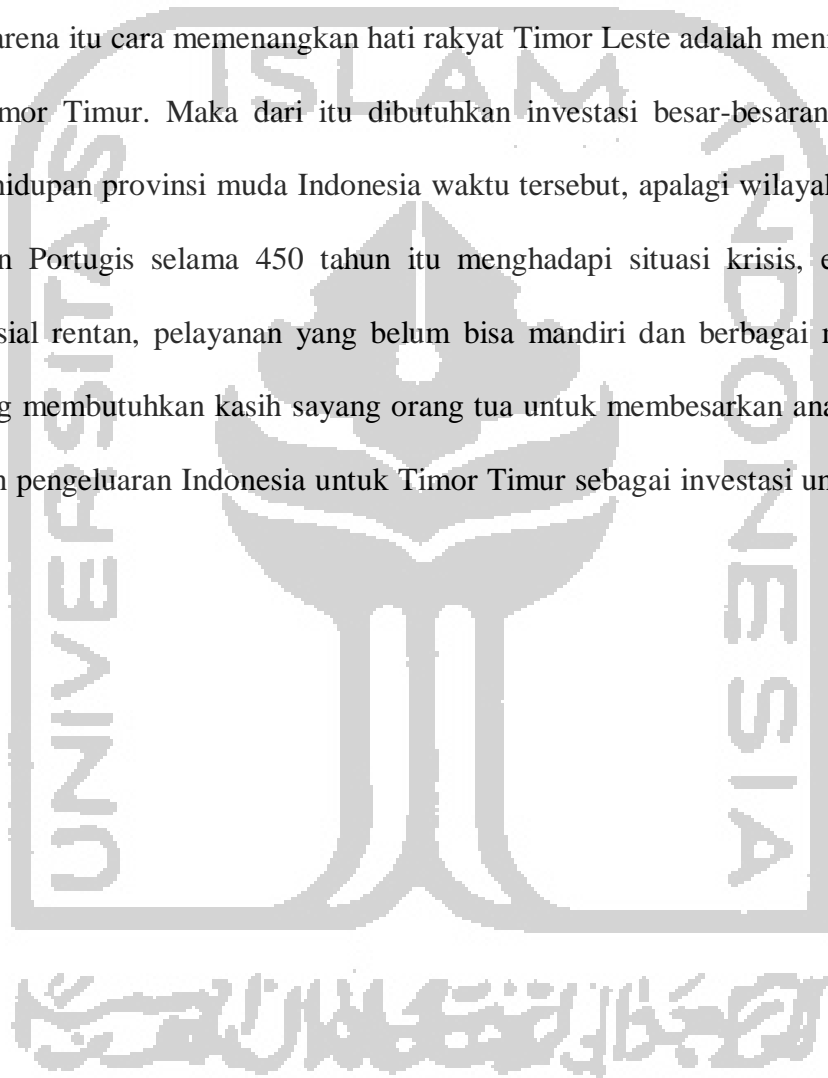
Dalam konteks ini jika melihat ketika Timor Leste masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia, gelontoran dana telah banyak dikeluarkan oleh Indonesia sebagai kompensasi bagi rakyat Timor Timur. Sebelum referendum, Timor Leste yang disebut Timor Timur pernah menjadi provinsi ke 27 sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Timor Timur yang sebelumnya dijajah 450 tahun oleh Portugis, akhirnya melepaskan diri dari Portugis setelah terjadi revolusi bunga di Portugis yang mengharuskan Portugis melepas wilayah-wilayah koloninya. Kemudian pada tahun 1976 Indonesia menjadikan sebagai provinsi ke 27 wilayah Indonesia.

Mengingat Timor Timur merupakan jajahan Portugal dan disatu sisi berdasarkan Konferensi Meja Bundar wilayah kedaulatan Indonesia adalah wilayah yang dijajah oleh Belanda, maka secara historis Timor Timur tidak memiliki kewajiban untuk menjadi wilayah



kedaulatan Indonesia. Untuk itulah strategi yang paling masuk akal bagi Indonesia waktu itu adalah memenangkan hati rakyat Timor Timur untuk membentuk identitas Timor Timur menjadi bangsa Indonesia, apalagi di Timor Timur ada FRETELIN yang menghendaki Timor Timur menjadi negara berdaulat.

Oleh karena itu cara memenangkan hati rakyat Timor Leste adalah meningkat taraf hidup masyarakat Timor Timur. Maka dari itu dibutuhkan investasi besar-besaran Indonesia untuk menunjang kehidupan provinsi muda Indonesia waktu tersebut, apalagi wilayah yang baru lepas dari penjajahan Portugis selama 450 tahun itu menghadapi situasi krisis, ekonomi lumpuh, ketegangan sosial rentan, pelayanan yang belum bisa mandiri dan berbagai masalah layaknya anak kecil yang membutuhkan kasih sayang orang tua untuk membesarkan anak itu. Berikut ini akan dijelaskan pengeluaran Indonesia untuk Timor Timur sebagai investasi untuk mendapatkan wilayah itu.



Tabel 1.1 (yang dikutip dari Tesis Rui Gomes)

**Alokasi Dana Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk Provinsi Timor Timur dan Beberapa Provinsi Terpilih, 1969/1970-1993/1994 (dalam Rp milyar)**

	Repelita I (1969/70- 1973/74) (Rp milyar)	Repelita II (1974/75- 1978/79) (Rp milyar)	Repelita III (1979/80- 1983/84) (Rp milyar)	Repelita IV (1984/85- 1988/89) (Rp milyar)	Repelita V (1989/90- 1993/94) (Rp milyar)	Total (Rp milyar)	Total (US\$ jt) <sup>a</sup>
Timor Timur	...	66.692	139.385	257.822	826.312	1.290.481	960,2
Nusa Tenggara Timur	2.223	24.788	129.296	175.199	526.309	857.815	641,2
Nusa Tenggara Barat	1.728	22.826	111.765	151.629	332.782	620.730	494,7
Papua (Irian Jaya)	1.469	15.825	87.388	155.224	652.353	912.259	609,5

Sebagai fakta, Indonesia memberikan investasinya yang besar dalam pembangunan Timor-Leste sebagai bukti niat baiknya kepada rakyat Timor-Leste. Memang benar bahwa Indonesia telah melakukan investasi di Timor-Leste lebih banyak daripada provinsi-provinsinya. Jika dilihat dari data diatas sebanyak Rp 1,3 milyar telah dialokasikan untuk pembangunan di wilayah ini antara 1976/1977 dan 1993/1994 (setara dengan US\$ 960 juta). Sebagai perbandingan, jumlah ini adalah 50% lebih banyak daripada yang dialokasikan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertetangga (Gomes, 2002).

Investasi ini memang mengakibatkan pertumbuhan PDB pesat apalagi setelah operasi operasi militer besar selesai yang menandakan kondusifitas keamanan dan suatu keadaan yang mendekati normal tercipta pada pertengahan 1980-an. Menurut data resmi, PDB tumbuh rata-rata sebesar 8,5% per tahun antara 1984 dan 1997, melampaui pertumbuhan PDB nasional Indonesia dan pertumbuhan PDB di provinsi manapun. Secara keseluruhan gambaran yang disajikan

mengenai perekonomian Timor-Leste semasa pendudukan cukup meyakinkan. Pertumbuhan digerakkan oleh konstruksi, transportasi dan komunikasi, serta pelayanan pemerintah, semuanya adalah sektor yang berhubungan dengan konsolidasi pendudukan. Juga terjadi pertumbuhan pesat di sektor perdagangan dan manufaktur, walaupun secara keseluruhan pangsa keduanya rendah, khususnya manufaktur. Sementara sektor pertanian, yang mempekerjakan 84% penduduk pada tahun 1990, mencatat pertumbuhan terendah di antara sektor-sektor utama lainnya (Gomes, 2002).

Tabel 1.2

**Pangsa sektoral PDB dan tingkat pertumbuhan 1984-1997 (%)**

	Pangsa Sektoral			Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan 1984-1997
	1984	1993	1997	
Pertanian	44,5	29,8	33,7	5,4
Manufaktur	1,4	2,9	3,1	13,7
Konstruksi	11,4	21,0	18,1	12,7
Perdagangan	8,4	9,3	9,1	11,5
Transportasi & Komunikasi	5,4	8,6	9,7	14,9
Pelayanan Pemerintah	21,7	21,5	19,9	8,1
PDB	92,8	93,1	93,6	11,05

Tabel 1.3 (Dari diambil dari (KORPRI Timor Timur, 1997))

**Anggaran dan dana intruksi Presiden (inpres) yang dialokasikan untuk Provinsi Timor  
Timur, 1976/77-1992/93**

<b>Tahun</b>	<b>Proyek sektoral</b>	<b>Anggaran rutin (Rp juta)</b>	<b>Anggaran Total (Rp juta)</b>	<b>Anggarab Khusus (Rp juta)</b>	<b>Dana Inpres (Rp juta)</b>	<b>Proyek Sektoral (US\$,000)</b>	<b>Anggaran Rutin (US\$'000)</b>
1976/77	232,8	1.475,6	1.708,4	...	552,0	561,0	3.555,7
1977/78	3.500,0	3.261,6	6.761,6	...	3.359,7	8.433,7	7.859,4
1978/79	4.333,5	3.134,5	7.468,0	...	3.997,0	8.824,1	6.382,6
1979/80	7.517,2	3.150,0	10.667,2	7000,0	5.152,9	11.996,8	5.027,1
1980/81	12.415,7	6.954,4	19.370,1	6.000,0	9.087,5	19.801,8	11.091,5
1981/82	11.213,2	8.435,5	19.648,7	6.500,0	14.884,6	17.617,0	13.252,9
1982/83	28.220,9	8.846,8	37,067,7	...	19.113,9	41.864,6	13.123,9
1883/84	22.871,4	9.432,1	32.303,5	7.000,0	20.826,0	23,257,5	9.591,3
1984/85	23.694,8	20.015,1	43.708,8	8.135,6	22.940,8	22,577,2	19.071,0
1985/86	35.181,2	13.038,6	48,219,8	14.147,8	24.192,3	31.406,2	11.639,5
1986/87	25.555,6	13.071,3	38.626,9	7.512,7	22.735,2	18.116,8	9.266,5
1987/88	15.075,7	11.218,1	26.293,8	5.372,6	...	9.142,4	6.803,0

<b>1988/89</b>	<b>14.265,8</b>	<b>11.516,3</b>	<b>25.802,1</b>	<b>6.379,7</b>	...	<b>8.371,4</b>	<b>6.748,5</b>
<b>1989/90</b>	<b>18.324,6</b>	<b>14.765,2</b>	<b>33.089,8</b>	...	...	<b>10.253,2</b>	<b>8.261,6</b>
<b>1990/91</b>	<b>25.641,3</b>	<b>17.037,2</b>	<b>42.678,7</b>	...	...	<b>13.720,0</b>	<b>9.116,3</b>
<b>1991/92</b>	<b>31.351,7</b>	<b>18.859,4</b>	<b>50.211,1</b>	...	...	<b>15.891,2</b>	<b>9.559,2</b>
<b>1992/93</b>	<b>40.083</b>	<b>18.832,4</b>	<b>59.026,0</b>	...	...	<b>19.674,8</b>	<b>9.290,7</b>
<b>Total</b>	<b>319.508,8</b>	<b>183.144,4</b>	<b>502.653,2</b>	...	...	<b>281.509,5</b>	<b>159.640,7</b>

Dari data (KORPRI Timor Timur, 1997) diatas jelas bahwa dalam masa perang yang paling keras, antara 1975-1979, kegiatan pertanian hampir sepenuhnya lumpuh. Kemudian, pengekangan banyak penduduk di dalam kamp-kamp “pemukiman kembali”, yang di dalamnya mereka terus dibatasi sebagian bahkan sampai akhir dasawarsa 1980-an dan kebebasan bergerak serta kemampuan bertani mereka dibatasi dengan ketat, membuat pemulihan berlangsung sangat pelan (antara 1983 dan 1986 sektor ini tumbuh di bawah 1% per tahun). Produksi dua bahan pangan utama, jagung dan beras, sampai akhir dasawarsa 1980-an belum pulih ke tingkat produksi masa sebelum perang.

Bahkan setelah keadaan sudah mulai kembali normal, kondisinya masih belum mendukung untuk pertumbuhan pertanian. Gangguan terhadap pola pemukiman tradisional penduduk pada tahun-tahun awal pendudukan memiliki dampak jangka panjang. Banyak penduduk yang terus dipaksa untuk tinggal di lahan yang lebih ditentukan oleh pertimbangan keamanan dan bukan karena kesuburannya. Perpindahan penduduk dan ketentuan hukum pertanahan yang baru mengakibatkan ketidakpastian hak atas tanah. Petani dihambat untuk

berpindah dari pola pertanian untuk keperluan sendiri ke pola pertanian untuk menghasilkan uang oleh karena genggam tangan besi militer dan mitra bisnisnya atas produksi.

Yang tidak kalah penting, pertanian dirugikan karena tingkat investasi yang rendah. Kurang dari 10% investasi negara diarahkan ke sektor pertanian, sementara lebih dari 50% dicurahkan ke dua sektor utama, yaitu transportasi dan komunikasi serta sektor pemerintahan sipil. Lebih lagi, penerima manfaat utama dari investasi di sana kemungkinan adalah transmigran Indonesia dan sektor perkebunan.

### **2.3 KEMAMPUAN MILITER INDONESIA**

Pada konteks ini William D. Coplin menerangkan bahwa kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Lebih lanjut William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

Pada hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124).

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

### 2.3.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Indonesia merupakan salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam anggaran belanja pertahun negara (APBN) 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana kepada sektor pertahanan dengan jumlah sebesar Rp. 107 triliun. Besaran ini membuat anggaran pertahanan menjadi sektor penerima alokasi APBN terbesar kedua setelah alokasi dana untuk infrastruktur. Selain menjadi negara dengan anggaran pertahanan yang besar, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang cukup kuat di kawasan Asia Tenggara.

**Tabel 1.4: Alokasi APBN Untuk Bidang Pertahanan** (kemenkeu, 2019)

No.	Tahun	Alokasi Anggaran
1.	2015	Rp. 105,9 T
2.	2016	Rp. 108,7 T
3.	2017	Rp. 120,0 T
4.	2018	Rp. 107, 6 T
5.	2019	Rp. 108,4 T

Selain memiliki anggaran pertahanan yang cukup besar, Indonesia juga memiliki angkatan bersenjata yang terdiri dari tiga (3) korps, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Selain itu tugas pengamanan juga dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Secara kuantitas, jumlah tentara Indonesia berjumlah 676.200 personel. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkuat keempat di Asia (Tempo, 2016). Selain itu juga

dibantu oleh aparat kepolisian yang berjumlah 430.000 personel (Jaya, 2016). Dengan angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah personel polisi terbanyak di dunia. Dengan adanya jumlah personel yang besar ini maka akan mendukung adanya pengamanan terhadap ancaman yang muncul.

### **2.3.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri**

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 2003, p. 126]). Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan wilayah territorial yang sangat luas, serta memiliki salah satu personel militer dan keamanan terbesar di dunia. Tentu, hal tersebut mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mengandalkan impor senjata atau alutista dari luar negara. Pada tahun 2018, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara importer senjata terbesar ke sepuluh di dunia (Muhaimin, 2018). Angka ini juga di ikuti dengan kelonjakan impor senjata sebesar 677% di awal 2018. Dengan total nilai sebesar US\$ 39 juta menjadi US\$ 15,1 miliar atau 0,26 persen dibandingkan Desember 2017 (Praditya, 2018).

Dari angka impor tersebut, impor senjata Indonesia terbanyak berasal dari Tiongkok (648 unit), Inggris (505 unit) dan Amerika Serikat (462 unit). Adapun belanja persenjataan tersebut dialokasikan terhadap tiga korps dalam tentara nasional Indonesia. Angkatan Laut mendapatkan alokasi 39,7%, (977 unit) Angkatan Darat sebanyak 45,5%(1,118 unit). Sementara itu alutista yang paling banyak diimpor Indonesia adalah C-705, Starstreak, FGM-148 Javelin, AGM0114K Hellfire, dan Mistral (Hartiani, 2016).



Meskipun menjadi negara dengan tingkat impor yang besar, setidaknya Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutista secara mandiri. Diantara beberapa alutista yang dikembangkan oleh Indonesia adalah sebagai berikut; *Pertama*, kendaraan tempur seperti panser dan tank, melalui PT Pindad dan beberapa perusahaan nasional lain, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan tempur secara mandiri seperti Panser Anoa dan Tank Harimau (Katadata, 2018). Dalam perkembangannya bahkan Indonesia telah mampu untuk di ekspor ke luar negeri seperti Panser Anoa yang diekspor Brunei Darussalam dan Bangladesh; *Kedua*, pengembangan jet tempur bersama dengan Korea Selatan (Detik, 2018); *Ketiga*, melakukan ekspor kapal perang ke Filipina; *Keempat*, pengembangan kapal selam bersama Korea Selatan dengan adanya transfer teknologi (Kompas, 2019); *Keenam*, mampu memproduksi amunisi dan senjata senjata laras panjang dan otomatis oleh PT Pindad (Pindad, 2018). Dengan kemampuan-kemampuan ini, maka menunjukkan bahwa Indonesia dapat secara mandiri dalam bidang alutista meskipun juga dibarengi dengan impor senjata.

### **2.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer**

Indikator ketiga menurut William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya keamanan kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan dan strategi militer tersebut berfungsi (Coplin, 2003, p. 128). Jika dilihat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dimana terdapat sekitar 250 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga merupakan multikultural Dengan keanekaragaman ini, tentu memungkinkan terjadinya gesekan dalam masyarakat. Hal kestabilan internal maka terdapat beberapa hal yang mengancam stabilitas keamanan internal Indonesia. diantara ancaman-ancaman yang ada adalah sebagai berikut (Aizid, 2013);

*Pertama*, Pemberontakan G30S/PKI. Gerakan G30S/PKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30S/PKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakangnya. Otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hingga pada puncaknya Pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap enam orang jenderal TNI AD. Tiga jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan Tiga jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Soeprapto dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup.

*Kedua* Proklamasi PRRI/PERMESTA ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual.

Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual, Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan, Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

*Ketiga*, Pemberontakan DI/TII. Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DI TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut Dalam perkembangannya, DI TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh.

*Keempat*, ancaman agresi negara asing, Indonesia dapat dihadapkan pada beberapa agresi yang dilakukan oleh negara asing. Dengan ancaman-acaman diatas, dapat memicu ketidakstabilan internal Indonesia, meskipun demikian, Indonesia memiliki jumlah Tentara terbanyak pertama di Asia Tenggara. Selain itu juga ditunjang dengan kepolisian yang juga memiliki personel yang berkualitas dan handal. Dengan demikian ancaman-ancaman yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas Indonesia dapat diatasi, oleh karena itu dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi Indonesia yang aman ini juga dipertegas dengan temuan The Gallup Law and Order yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling aman kesembilan di dunia (Putra, 2018).

## **2.4 KONTEKS INTERNASIONAL**

Pelanggar HAM selalu menjadi stigma internasional ketika mengingat masa pendudukan Indonesia di Timor Leste, itulah yang kemudian dalam *Decision Making* sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 164-62). Kesan bahwa semasa pendudukan Indonesia di Timor Leste penuh citra kekerasan dan

perampasan hak asasi, itulah yang menjadi alasan Timor Leste mendapat simpati global (Araujo, 2014).

Berdasarkan analisis kuantitatifnya, *Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR)* menemukan bahwa sekitar 18.600 pembunuhan tidak sah (illegal) dan penghilangan paksa terhadap orang Timor-Leste yang bukan kombatan dilakukan antara tahun 1974 dan 1999, yang mayoritas besarnya, 70%, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk Milisi pro Indonesia sebagai pembantunya. Pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa dilakukan oleh gerakan Perlawanan dan pasukan keamanan Indonesia. Profil temporal dari pembunuhan dan penghilangan yang berkaitan dengan gerakan Perlawanan sangat berbeda dengan profil pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia (The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR), 2013).

Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan dilakukan oleh anggota-anggota Perlawanan sangat terkonsentrasi pada tahun-tahun awal konflik, terutama pada waktu dan sesudah konflik antar-partai yang dikenal sebagai “perang sipil” dan pada waktu pembersihan internal partai Fretilin pada tahun 1976 dan 1977-1978. Sementara 49,0% (561/1.145) dari semua pembunuhan dan penghilangan pada tahun 1975 yang didokumentasikan dilakukan oleh Fretilin/Falintil, persentasenya menurun tajam (meskipun pada 1976-1984 angka mutlak pembunuhan dan penghilangan tidak turun) pada periode sesudahnya, menurun menjadi 16,6% (563/3.398) pembunuhan dan penghilangan 1976-1984, sampai 3,7% (18/488) pada 1985-1998 dan menjadi 0,6% (5/898) pada tahun 1999. Ada peningkatan terkait dalam persentase pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pasukan Timor-Leste pembantunya (The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR), 2013).

Laporan dari CAVR diatas seolah memberikan tamparan tegas bagi pencitraan Indonesia di dunia global. Indonesia dikenal di internasional sebagai negara pembela hak kemerdekaan bangsa lain, juga dikenal sebagai negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia. Namun ketika hasil penelitian tersebut muncul, citra Indonesia sedikit banyak tercoreng. Maka dari itu menjadi masuk akal jika Indonesia paling terdepan membela Timor Leste bergabung karena rasa bersalah masa lalu yang ingin ditebus. Fakta pelanggaran HAM diatas memberikan kesan bahwa semasa pendudukan Indonesia di Timor Leste penuh citra kekerasan dan perampasan hak asasi, itulah yang menjadi alasan Timor Leste mendapat simpati global.



## **BAB III**

# **PENOLAKAN SINGAPURA TERHADAP KEINGINAN TIMOR LESTE BERGABUNG ASEAN**

### **3.1. KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA**

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Pada bab ini tiga faktor tersebut akan penulis elaborasikan dengan sub-sub yang penulis sajikan. Karena Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Apalagi kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politis yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri

#### **3.1.1 BIROKRASI**

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 81-2). Dengan demikian maka dalam penerimaan bergabungnya Timor Lest ke ASEAN juga dipengaruhi oleh birokrat dalam hal ini kementrian.

### **Kementrian Luar Negeri Singapura (*Ministry of Foreign Affairs Singapore*)**

penolakan pemerintah Singapura terhadap bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN juga berasal dari Kementerian Luar Negeri Singapura. Dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mendapatkan mandat undang-undang untuk mengatur hubungan luar negeri. Hal ini tertera di dalam website resmi kemntrian Singapura. Menurut situs resmi tersebut tersebut kementrian ini memiliki delapan fungsi (Ministry of Foreign Affairs, 2019) yaitu:

- Menjunjung tinggi kedaulatan Singapura
- Mempromosikan lingkungan regional yang damai
- Mempertahankan relevansi Singapura secara internasional
- Perluas ruang politik dan ekonomi Singapura
- membagikan pengalaman perkembangan Singapura ke dunia
- Terhubung dengan orang Singapura yang bepergian dan tinggal di luar negeri, bantu mereka pada saat dibutuhkan

Dengan melihat mengenai fungsi dari Kementerian Luar Negeri maka diketahui bahwa urusan luar negeri, kemudian urusan diplomasi, negosiasi dan hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri. Dalam konteks penolakan Timor Leste bergabung ASEAN, Dari data yang didapat dari Singapura Hanya Singapura dan Laos yang berulang kali memblokir tawaran negara itu dengan alasan bahwa itu Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung dengan organisasi regional. Mereka berpikir bahwa Timor-Leste perlu mengatasi sejumlah rintangan sebelum menerima keanggotaan (Kapur, 2016).

### **3.1.2 Partai Politik**

Pada komponen kedua adalah partai politik, dimana menurut William D. Coplin, partai politik merupakan *partisan influencer*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kelompok kedua ini melakukan keberpihakan terhadap aktor politik yang ada dalam hal ini eksekutif. Selain itu partai politik berfungsi dalam menyalurkan tuntutan-tuntunan masyarakat kepada pengambil kebijakan, dengan demikian pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 84-5).

Di dalam konteks ini perjabat pemerintahan khususnya di ranah eksekutif berasal dari kader partai, apalagi perdana menteri posisi politis yang secara demokrasi mesti berasal dari partai politik. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong merupakan salah satu senior dari partai People's Action Party, singkatan: PAP, adalah sebuah partai politik di Singapura. Partai ini berkuasa sejak tahun 1954 dan menguasai formasi pemerintahan Singapura. Pada pemilu parlemen 1963, PAP sangat dominan melalui sistem demokrasi parlementer dan tampil sebagai partai otoriter yang hampir tidak bisa dilawan oleh pihak oposisi. Bidang politik, sosial, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas pembangunan bangsa. Para pengkritik dari kalangan oposisi tak mampu berbuat banyak karena PAP sangat mendominasi parlemen. Kebijakan-



kebijakannya jarang ditentang rakyat. Bahkan, hampir tak pernah terdengar adanya upaya demonstrasi. Hal ini turut membantu PAP meningkatkan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan negara yang pesat (Bellows, 2009).

Alih-alih memberikan kabar baik terkait dukungan Singapura agar Timor Leste bergabung ASEAN namun justru malah mengajak Timor Leste untuk memperkuat kerja sama dan mengikuti *Singapore Cooperation Programme*, hal ini bisa dilihat ketika Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri pada tahun 2017. Berikut adalah bunyi suratnya yang dikutip *straitstimes.com* "*Timor-Leste has made great strides since its independence in 2002, including through your personal contributions during your first term as Prime Minister, and later as President of the Authority of the Oe-Cusse Special Administrative Region, As small states, we share many common concerns and interests and have worked well together bilaterally and at multilateral fora, I look forward to working with you to further strengthen our bilateral ties*". (Nn, Singapore PM Lee Hsien Loong congratulates new Timor Leste counterpart Mari Alkatiri, 2017).

### **3.1.3 Kelompok Yang Berkepentingan**

Variabel ketiga ini adalah "*interest influencers*" yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 87). Dalam hal ini kelompok menikmati kondisi Timor Leste belum bergabung ASEAN adalah seorang-pengusaha dari Singapur bernama Zuo Haibin.

#### **Zuo Haibin dan Vico Construction**

Timor Leste telah bekerjasama dengan investor swasta untuk mengembangkan pembangunan properti 14 lantai hingga 16 lantai, yang terdiri dari apartemen mewah, unit ritel

dan properti kantor, di Timor-Leste. Proyek ini akan menelan biaya sekitar US \$ 22,8 juta, termasuk biaya konstruksi, tanah, penjualan dan administrasi; mitra JV akan memberikan kontribusi hingga US \$ 20 juta sebagai pinjaman pemegang saham kepada perusahaan JV. Setiap pinjaman pemegang saham bebas bunga. Setiap persyaratan modal yang melebihi sumber daya JV sendiri akan didanai oleh pinjaman bank, katanya. A-Smart akan mengambil 60 persen saham mayoritas di JV dan karenanya, komitmen modalnya di JV akan mencapai US \$ 12 juta, yang sebagian besar akan didanai dari sumber kas internal. JV adalah aliansi strategis antara kelompok dan Liao Sheng Tung dan Ng Choon Meng, yang merupakan mitra bisnisnya di Timor-Leste, serta Vico Construction dan Daniel Vincent Iong Remedious, yang merupakan calon pemilik tanah. Vico Construction adalah JV antara Zuo Haibin dan pengembang Cina Nanshan Group (Meixiani, 2019).

Situs proyek, yang terdiri dari area seluas 3.135 meter persegi tanah hak milik, terletak di sepanjang garis pantai Lecidere di Dili. Langsung menghadap Pelabuhan Dili, situs tersebut terletak dekat dengan kantor pusat Bank Dunia, kedutaan asing dan kantor pemerintah Timor. Ma Wei Dong, ketua A-Smart Holdings, mengatakan masuknya perusahaan ke pasar negara berkembang, yang kaya akan minyak dan gas, "tepat waktu" karena ada kekurangan properti perumahan dan komersial yang berkualitas di sana. *"Memanfaatkan keuntungan penggerak pertama, tepat waktu kami akan memungkinkan kami untuk memperluas basis pendapatan kami dan menghasilkan jalan baru pendapatan yang diperlukan bagi kami untuk tumbuh secara berkelanjutan."* Kelompok itu mengatakan yakin bahwa rencana pemerintah untuk mengubah Pelabuhan Dili menjadi pusat pelayaran akan memungkinkan pembeli rumah dan investor menikmati pertumbuhan dalam penilaian pembangunan (Meixiani, 2019).

### 3.1.4 Media Massa

Variabel keempat adalah Media Massa atau “*mass influencers*”, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis “*framing*” yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

Dalam konteks ini peran media dalam melakukan framing terkait penolakan Singapura terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN merupakan hal yang penting namun yang penulis dapatkan berita tentang penolakan Singapura jarang ditemukan, berkebalikan dari itu berita tentang bantuan Singapura yang diberikan ke Timor Leste mudah diakses penulis, berikut adalah headline berita yang penulis dapatkan;

No.	Nama Media	Isi	Situs
1	The Straitstimes	Singapore, Timor-Leste reaffirm bilateral ties	<a href="https://www.straitstimes.com/singapore/timor-leste-reaffirm-bilateral-ties">https://www.straitstimes.com/singapore/timor-leste-reaffirm-bilateral-ties</a>
2	Businesstimes	A-Smart in JV to build mixed development in Timor-Leste	<a href="https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/a-smart-in-jv-to-build-mixed-development-in-timor-leste">https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/a-smart-in-jv-to-build-mixed-development-in-timor-leste</a>
3	Todayonline	East Timor stake buy brings	<a href="https://www.todayonline.com/world/east-timor-stake-buy-brings-sunrise-gas-field">https://www.todayonline.com/world/east-timor-stake-buy-brings-sunrise-gas-field</a>

		Sunrise gas field a step closer	<a href="#">step-closer</a>
--	--	---------------------------------	-----------------------------

(Tabel 1.5)

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media menetapkan framing positif framing positif dengan menulis tentang bantuan bantuan Singapura ke Timor Leste tanpa banyak memberitakan mengenai penolakan Singapura terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan secara cerdas. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media.;

### **3.2 KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN**

Dalam konteks ini penulis melihat realita perekonomian Timor Leste, penting untuk dilihat karena perekonomian Timor Leste merupakan cerminan bagaimana kelangsungan hidup Timor Leste kedepan. Mengingat di era keterbukaan ini daya saing yang menentukan keselamatan sebuah negara. Maka dari itu Timor Leste harus bisa bersaing,

#### **3.2.1 Kondisi Ekonomi**

Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. dimana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa Kemampuan ekonomi suatu Negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri Negara itu. Coplin juga menerangkan bahwa terdapat dua kriteria untuk menaksir kemampuan ekonomi suatu negara. *Pertama*, kapasitas produksi barang dan jasa; *Kedua*, Ketergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional (Coplin, 2003, pp. 115-20).

Negara muda Timor-Leste di Asia Tenggara itu berharap bahwa Singapura akan memainkan peran yang lebih besar dalam kisah pembangunannya karena Timor Leste berusaha untuk menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2030.

Menteri Luar Negeri dan Kerjasamanya Dionisio da Costa Babo Soares mengatakan dalam kunjungan resminya yang pertama ke Republik bahwa Timor Leste perlu menarik lebih banyak investasi dalam industri potensial utama seperti pariwisata, energi dan pertanian. Dia mengatakan negara Singapura telah meletakkan dasar untuk memungkinkan investasi mengalir ke Timor Leste, yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002 dan memiliki populasi muda 1,3 juta (Wei, 2019).

Menurut Bank Dunia, Negara-Negara Penghasilan Menengah memiliki pendapatan nasional bruto per kapita (GNI) dari US \$ 1.006 menjadi \$ 12.235 (S \$ 1.369 hingga S \$ 16.655). Timor Leste terdaftar sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah, dengan GNI antara \$ 1.006 dan \$ 3.995. Dalam pidatonya di Forum Bisnis Timor-Leste-Singapura yang diadakan di Shangri La Hotel, Dr Soares mengatakan negaranya telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Asean. "Kami adalah negara yang termasuk (geografis) di wilayah ini," tambahnya. Mantan presiden negara itu Jose Ramos-Horta juga menghadiri forum itu. Dr Ramos-Horta adalah penerima bersama Hadiah Nobel Perdamaian 1996 atas pekerjaannya dalam membantu menyelesaikan konflik di Timor Leste, yang dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1975 (Wei, 2019).

Negara ini saat ini bergantung pada pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan pendapatan dari sumber daya alam, Bank Dunia menyatakan di situs webnya. Tetapi ketidakpastian politik dan ekonomi telah mendorong produk domestik bruto (PDB) Timor Leste turun untuk tahun kedua berturut-turut, laporan ekonomi negara itu pada bulan Mei

menunjukkan. Namun, Bank Dunia mencatat bahwa PDB diperkirakan akan tumbuh 3,9 persen tahun ini, dengan Anggaran negara disetujui pada bulan Februari. Ini akan membuat negara meningkatkan pengeluaran publik, yang mencakup US \$ 366,4 juta untuk infrastruktur (Wei, 2019).

Duta Besar non-residen Singapura untuk Timor Leste Roland Ng mengatakan bahwa kedua negara memiliki kesamaan. "Kami berdua negara pulau kecil yang mengakui pentingnya membuka dan terhubung ke jaringan global," kemudian menambahkan bahwa Singapura siap membantu Timor Leste membangun layanan sipil dan ekonominya. Mr Ng menambahkan bahwa kunjungan dua hari Dr Soares ke Singapura, sebagai bagian dari kunjungan pengantar ke wilayah tersebut, menggarisbawahi hubungan erat antara kedua negara. Sekitar 700 pejabat Timor-Leste telah berpartisipasi dalam kursus di sini seperti dalam pengembangan ekonomi, administrasi publik dan penerbangan sipil sebagai bagian dari program pemerintah Singapura, katanya. Mr Ng mendesak Timor Leste untuk menggunakan status Singapura sebagai pusat regional untuk lebih mengembangkan ekonominya (Wei, 2019).

### **3.3 KEMAMPUAN MILITER SINGAPURA**

Pada konteks ini William D. Coplin menerangkan bahwa kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Lebih lanjut William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

Pada hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124)..

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua*, tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

### **3.3.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer**

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Militer Singapura memiliki 3 sektor, yaitu Angkatan Darat (AD), angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Jumlah personel militer Singapura mencapai 385 ribu orang, dengan 72,5 ribu diantaranya personel aktif dan 312,5 ribu personel cadangan.

Angkatan udara Singapura memiliki 100 penyerang dengan 100 serangan. Selain itu, Singapura memiliki 36 personel dalam pelatihan dan 9 transportasi militer AU. AU Singapura memiliki 78 helikopter dan 17 diantaranya adalah helikopter serang. AD Singapura memiliki 190 tank perang, dan kendaraan perang lainnya mencapai 3,5 ribu. Selain itu, ada 48 artileri otomatis dan 138 artileri manual, dan 18 proyektor roket (Gao, 2018).

Singapura rata-rata membuat sendiri artileri manual seri Howitzer (beberapa buatan Israel) mereka, sedangkan kendaraan seperti tank, kendaraan militer, dan peluncur misil dan roket buatan Inggris, Amerika Serikat, Israel, dan Kanada. AL Singapura memiliki total aset 40, dengan 6 frigate, 6 corvet, 11 kapal patroli, dan 4 pangkalan perang. Kemiliteran Singapura

didukung oleh berbagai sumber daya lainnya, yaitu 3,6 juta pekerja di bidang kemiliteran, dengan perdagangan yang berkaitan dengan kelautan mencapai 3,5 ribu (Loh, 2019).

Anggaran yang digelontorkan pemerintah Singapura biasanya 3-4 persen dari PDB, The Diplomat melansir. Pertahanan menempati pengeluaran tertinggi anggaran pemerintah Singapura, mencapai 18 persen, diikuti oleh transportasi yaitu 17 persen. Dengan sumber daya terbatas, Singapura memastikan bahwa setiap sistem bersinergi dengan baik. Antara teknologi, pelayanan, dan pelatihan sumber daya dikerjakan se-efektif mungkin untuk membangun militer profesional (Parameswaran, 2018).

### **3.3.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri**

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 2003, p. 126]).

Kebijakan luar negeri Singapura telah lama didasarkan pada kemitraan ekonomi, namun tidak menggunakan aliansi militer sebagai stimulus kepentingan ekonomi ini. Sebagai gantinya, Singapura mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pengeluaran pertahanan, dengan kata lain ini menjadikan Singapura sebagai negara yang secara militer patut disegani dan diperhitungkan. Antara 2008 dan 2012, Singapura menyumbang empat persen dari semua impor senjata global, menjadikannya importir perangkat keras militer terbesar kelima. Negara ini sekarang menghabiskan 25 persen dari anggaran tahunannya untuk pertahanan. Pengeluaran militernya telah meningkat dari \$ 600 juta setiap tahun pada awal 1980-an menjadi \$ 12 miliar pada 2013 (Mustafa, 2014).



### 3.3.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer

Indikator ketiga menurut William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya keamanan kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan dan strategi militer tersebut berfungsi (Coplin, 2003, p. 128). *"In a world where the big fish eat small fish and the small fish eat shrimps, Singapore must become a poisonous shrimp,"* kata Lee Kuan Yew, bapak bangsa Singapura.

Lee menggambarkan kekhawatiran bahwa jika terjadi konflik, Singapura akan dikuasai dan dengan demikian Singapura harus mengambil sikap defensif. *"Singapore has no territory to fall back on and to regroup its military in,"* kata Wendell Minnick, editor Berita Pertahanan yang bermarkas di Taiwan. *"Over time Singapore has realised that the defence of its territory needs to be a 'pre-emptive equation' rather than a defensive one, much like Israel."* Kesadaran ini telah mengubah kebijakan pertahanan Singapura dari filosofi "udang beracun" tentang pertahanan diri menjadi sesuatu yang lebih agresif kata Brigadir Jenderal (dan sekarang Perdana Menteri) Lee Hsien Loong pada tahun 1984. Pada 1980-an Singapura berubah. dari "udang beracun" ke strategi "landak", yang bertujuan untuk menimbulkan biaya yang tidak dapat ditoleransi pada musuh potensial dan bertahan lebih lama dari penyerang jika terjadi konflik (Mustafa, 2014).

Ancaman teroris utama ke Singapura adalah dari Jemaah Islamiyah (JI), yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan Abu Sayyaf. Jemaah Islamiyah diketahui telah melakukan pemboman Bali pada tahun 2002, seorang informan mengungkapkan informasi kepada Departemen Keamanan Internal Singapura mengenai Muhammad Aslam Yar Ali Khan, seorang warga Singapura keturunan Pakistan, yang merupakan anggota kelompok yang bermitra dengan Al-Qaeda (Nn, Islamic militant detained in Singapore under Internal Security Act, 2005).

Muhammad Aslam Yar Ali Khan ditempatkan di bawah pengawasan Departemen Keamanan Internal Singapura, setelah itu ia pergi ke Pakistan pada 4 Oktober. Pria ini ditangkap oleh pasukan Aliansi Utara Afghanistan di Afghanistan. Pada 9 Desember 2001, 13 tersangka ditangkap. Segera setelah itu, sebuah video ditemukan di sebuah rumah yang ditinggalkan di Kabul Afghanistan menunjukkan seorang narator di Singapura yang menggambarkan bagaimana menyerang orang Amerika menggunakan bahan peledak. Penyelidik menemukan kaset serupa di kediaman para pria yang ditangkap. Secara keseluruhan, 33 orang ditangkap sehubungan dengan rencana ini. Pada Agustus 2002, 21 anggota Jemaah Islamiyah lainnya ditangkap oleh otoritas Singapura (Nirmala, 2013).

Otoritas Singapura percaya bahwa Jemaah Islamiyah tetap aktif di Asia Tenggara dan merekrut anggota baru. Pada tanggal 25 Agustus 2005, hakim investigasi Prancis Jean-Louis Bruguière memilih Singapura bersama dengan Tokyo dan Sydney sebagai sasaran potensial terorisme Al-Qaeda (Nirmala, 2013).

### **3.4 KONTEKS INTERNASIONAL**

Sub bab ini membahas mengenai faktor determinan ketiga yaitu konteks internasional. Dalam penjelasannya, William D. Coplin menjelaskan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 164-62). Dengan demikian maka bab ini menjelaskan kondisi internasional yang terjadi sehingga mendorong Singapura untuk penolakan terhadap keinginan Timor Leste bergabung ASEAN. Dengan demikian maka terdapat tiga (4) sub-bab yang akan dibahas dalam bab ini. *Pertama*, hubungan erat Indonesia dan Timor Leste; *Kedua*, Timor Leste dan Amerika *Ketiga*, Timor Leste dan Australia dan *Keempat*, Timor Leste dan China

Dalam konteks ini proses pembangunan negara Timor Leste ada beberapa negara yang kemudian menjadi partner dekat Timor Leste dalam untuk membantu negara itu berdiri. Menurut (Ben Dolven, Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement, 2012) Negara-negara tersebut akan dijelaskan dibawah ini merupakan negara yang secara geopolitik merupakan negara rival Singapura dalam kontestasi global, sebut saja Indonesia, Amerika, Australian dan China. Berikut adalah penjelasannya;

### **3.4.1 Indonesia**

Timor-Leste telah mengambil pendekatan praktis untuk menjalin hubungan dengan tetangga mereka yang relatif lebih dari 240 juta.. Sebuah laporan akhir yang dikeluarkan oleh Indonesian-Timor-Leste Truth Commission bersama pada Mei 2008 menyalahkan Indonesia atas kekejaman pada tahun 1999. Walaupun laporan tersebut berhenti untuk merekomendasikan amnesti bagi para pemimpin militer dan milisi Indonesia, itu dipandang sebagai perjanjian diam-diam untuk bergerak melewati sejarah traumatis. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan "penyesalan mendalam" atas pelanggaran HAM. Presiden Ramos-Horta mendesak Timor-Leste untuk melanjutkan dan mengesampingkan masa lalu setelah laporan itu dirilis. Indonesia dipandang sebagai pengusul yang paling antusias untuk mengizinkan keanggotaan Timor-Leste di ASEAN. Kedua belah pihak telah mengeksplorasi kerja sama energi dan hubungan ekonomi lainnya. Program-program lain bergerak lebih lambat, termasuk lebih banyak koordinasi dalam manajemen perbatasan, dan kemungkinan perjalanan bebas visa antara Timor-Leste dan provinsi tetangga Indonesia di Timor Barat.

### **3.4.2 Amerika Serikat**

Program bantuan AS di Timor-Leste telah berupaya membangun ekonomi pasar bebas yang mandiri, seperti mengembangkan layanan publik dasar seperti layanan kesehatan, dan mendukung tata pemerintahan yang baik melalui sistem politik demokrasi yang baru muncul dan prakarsa demokrasi pasca konflik. Total bantuan luar negeri A.S. ke Timor-Leste tahun 2012 diperkirakan \$ 14,5 juta. Total permintaan untuk Timor-Leste pada tahun 2013 sama dengan \$ 12,8 juta. Pada Mei 2010, Millennium Challenge Corporation menyetujui program ambang batas tiga tahun senilai \$ 10 juta dengan Timor-Leste. Bantuan A.S. telah membantu pembangunan ekonomi dan politik Timor-Leste dengan mendukung media independen, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik serta memperkuat proses pemilihan, membangun lembaga peradilan, dan memperkuat kapasitas pemerintah di berbagai bidang termasuk pengelolaan sumber daya fiskal. Pada Juli 2011, Departemen Luar Negeri US dan Kementerian Luar Negeri Cina mengumumkan program bersama untuk mempromosikan ketahanan pangan di Timor-Leste.

### **3.4.3 Australia dan Selandia Baru**

Dukungan politik Australia untuk tujuan orang Timor telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara merdeka Timor-Leste. Banyak orang Australia memiliki rasa hutang kepada orang Timor untuk bantuan yang mereka berikan kepada pasukan Australia melawan Jepang di sana selama Perang Dunia II. Australia dan Selandia Baru telah membantu memberikan stabilitas dan membantu menjaga situasi hukum dan ketertiban di Timor-Leste selama periode ketidakstabilan sejak 1999. Ketika situasi keamanan membaik, Australia dan Selandia Baru telah mengurangi kehadiran militer mereka di negara itu.

Terlepas dari keterlibatan ini, hubungan antara Australia dan Timor-Leste tegang oleh ketidaksepakatan mengenai sumber daya energi Laut Timor. Perdana Menteri Minster Gusmao meminta Australia untuk lebih jujur dalam perundingannya atas sumber daya hidrokarbon bawah

laut. Diperkirakan oleh satu sumber bahwa Australia dan Timor-Leste akan berbagi pendapatan sebanyak \$ 30 miliar dari ladang Greater Sunrise. Timor-Leste dilaporkan memperoleh dua kapal patroli Korea selain dua kapal patroli Tiongkok yang baru-baru ini diperolehnya. Ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan kembali kemerdekaan Timor-Leste dan menjauhkan diri dari Australia yang sebelumnya menawarkan untuk melakukan patroli laut untuk Timor-Leste. Timor-Leste memiliki kekayaan besar di bawah dasar laut di ladang minyak dan gas yang dikenal sebagai Greater Sunrise antara itu dan Australia.

Di bawah perjanjian sebelumnya, keputusan tentang bagaimana mengeksploitasi sumber daya energi Laut Timor harus dibuat secara komersial. Timor-Leste telah berharap bahwa perusahaan-perusahaan swasta akan memutuskan untuk membangun saluran pipa ke Timor-Leste, daripada ke Darwin, Australia. Keputusan semacam itu akan memungkinkan Timor-Leste untuk mengembangkan fasilitas pemrosesan di Timor-Leste. Kedalaman dasar laut dan kenaikan curam di sisi Timor-Leste dari Laut Timor telah bekerja melawan kasus Timor-Leste. Laporan media Australia mengatakan bahwa perusahaan swasta telah memutuskan untuk membangun anjungan apung di Laut Timor alih-alih pipa ke Darwin atau Dili. Woodside Corporation telah menyatakan bahwa mereka percaya anjungan lepas pantai akan bernilai masing-masing \$ 13 miliar untuk Australia dan Timor-Leste.

#### **3.4.4 China**

Tiongkok memberikan bantuan dengan pembangunan gedung-gedung pemerintah dan baru-baru ini menjual kapal-kapal patroli ke Timor-Leste yang seharusnya membantu Timor-Leste melindungi sumber daya kelautannya. Timor-Leste menerima pengiriman dua kapal patroli angkatan laut Kelas Shanghai pada Juni 2010. Timor-Leste kehilangan sekitar \$ 40 juta setahun untuk penangkapan ikan ilegal di perairannya. Bantuan Tiongkok untuk Timor-Leste mungkin

dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan sumber energi dari negara tersebut. Keputusan Timor-Leste untuk membeli kapal-kapal patroli dari Tiongkok daripada bergabung dengan program kapal patroli Pasifik Selatan pemerintah Australia mungkin dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menyeimbangkan hubungan mereka dengan Australia.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai alasan Indonesia untuk menerima dan alasan Singapura menolak proposal Timor Leste bergabung ASEAN. Adapun alasan Indonesia menerima keanggotaan Timor Leste di ASEAN jika ditinjau dari tiga (3) variabel determinan dengan pendekatan *decision making process*.

**Pertama, kondisi politik domestik (dalam negeri),** Dari data yang didapat dari Singapura berulang kali menolak proposal Timor Leste bergabung ASEAN dengan alasan bahwa itu Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung dengan organisasi regional. Mereka berpikir bahwa Timor-Leste perlu mengatasi sejumlah rintangan sebelum menerima keanggotaan

b.) Partai Politik, dalam partai politik hal ini tidak menjadi isu yang menjadi perhatian utama. Meskipun demikian terdapat pernyataan ketua DPR RI bahwa Indonesia akan terus mendukung Timor Leste bergabung ASEAN

c.) Kelompok kepentingan, adapun kelompok kepentingan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (PT. WIKA) yang membangun kerjasama bersama pemerintah Timor Leste dalam membangun sarana infrastuktur di Timor Leste

d.) media massa, dalam hal ini ratifikasi penerimaan bergabungnya Timor Leste oleh Indonesia cukup mendapat perhatian utama media. Dengan demikian terdapat dorongan yang signifikan dari komponen birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan media massa turut menglampanyekan bergabungnya Timor Leste ke ASEAN. Sementara itu dari tidak ada tekanan dari media massa.

**Kedua, kemampuan ekonomi dan militer.** a.) kondisi ekonomi; Menteri Luar Negeri dan Kerjasamanya Dionisio da Costa Babo Soares mengatakan dalam kunjungan resminya yang

pertama ke Republik bahwa Timor Leste perlu menarik lebih banyak investasi dalam industri potensial utama seperti pariwisata, energi dan pertanian. Dia mengatakan negara Singapura telah meletakkan dasar untuk memungkinkan investasi mengalir ke Timor Leste, yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002 dan memiliki populasi muda 1,3 juta. b.) kemampuan militer Indonesia, Indonesia memiliki kemampuan militer yang cukup besar. Hal ini juga ditopang dengan tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri yang cukup besar. Selain itu terdapat beberapa potensi ancaman yang mengganggu kestabilan internal Indonesia seperti terorisme, pemberontakan dan ancaman negara luar. Akhirnya diketahui bahwa Timor Leste memiliki ketergantungan dengan Indonesia dalam hal ekonomi dan pembangunan. Sementara itu dalam bidang kemampuan militer, Indonesia memiliki salah satu kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara disamping.

**Ketiga, konteks internasional.** Laporan dari CAVR membuktikan bahwa Indonesia terbukti melanggar HAM semasa aneksasinya terhadap Timor Leste. seolah memberikan tamparan tegas bagi pencitraan Indonesia di dunia global. Indonesia dikenal di internasional sebagai negara pembela hak kemerdekaan bangsa lain, juga dikenal sebagai negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia. Namun ketika hasil penelitian tersebut muncul, citra Indonesia sedikit banyak tercoreng. Maka dari itu menjadi masuk akal jika Indonesia paling terdepan membela Timor Leste bergabung karena rasa bersalah masa lalu yang ingin ditebus. Fakta pelanggaran HAM diatas memberikan kesan bahwa semasa pendudukan Indonesia di Timor Leste penuh citra kekerasan dan perampasan hak asasi, itulah yang menjadi alasan Timor Leste mendapat simpati global.

Dalam penelitian ini telah juga sebagai pebanding telah dijelaskan mengenai alasan Indonesia untuk menerima dan alasan Singapura menolak proposal Timor Leste bergabung



ASEAN. Adapun alasan Singapura menolak keanggotaan Timor Leste di ASEAN jika ditinjau dari tiga (3) variabel determinan dengan pendekatan *decision making process*. **Pertama, kondisi politik domestik (dalam negeri)**, dimana terdapat empat pihak yang ditinjau; a.) Birokrasi, Dari data yang didapat dari Singapura berulang kali menolak proposal Timor Leste bergabung ASEAN dengan alasan bahwa itu Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung dengan organisasi regional. Mereka berpikir bahwa Timor-Leste perlu mengatasi sejumlah rintangan sebelum menerima keanggotaan. b.) Partai Politik, dalam partai politik hal ini tidak menjadi isu yang menjadi perhatian utama. Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang juga merupakan senior partai PAP sebagai otoritas tertinggi Singapura yang menolak keanggotaan Timor Leste. c.) Kelompok kepentingan, Zou Haibin dan Vico Construction Timor Leste telah bekerjasama dengan investor swasta untuk mengembangkan pembangunan properti 14 lantai hingga 16 lantai, yang terdiri dari apartemen mewah, unit ritel dan properti kantor, di Timor-Leste. Proyek ini akan menelan biaya sekitar US \$ 22,8 juta, termasuk biaya konstruksi, tanah, penjualan dan administrasi; d.) media massa media di Singapura ditemukan bahwa menetapkan framing positif dengan menulis tentang bantuan bantuan Singapura ke Timor Leste tanpa banyak memberitakan mengenai penolakan Singapura terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan secara cerdas. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media

**Kedua, kemampuan ekonomi dan militer.** a.) kondisi ekonomi; jika dilihat dari biaya pengeluaran Indonesia terhadap Timor Leste semasa masih menjadi bagian Indonesia, memakan biaya yang cukup tinggi, dana yang digelontorkan ke Timor Leste lebih banyak daripada dana yang digelontorkan ke wilayah lain di Indonesia; b.) Kemampuan militer Angkatan udara Singapura memiliki 100 penyerang dengan 100 serangan. Selain itu, Singapura memiliki 36

personel dalam pelatihan dan 9 transportasi militer AU. AU Singapura memiliki 78 helikopter dan 17 diantaranya adalah helikopter serang. AD Singapura memiliki 190 tank perang, dan kendaraan perang lainnya mencapai 3,5 ribu. Selain itu, ada 48 artileri otomatis dan 138 artileri manual, dan 18 proyektor roket.

**Ketiga, konteks internasional.** Dari data yang ditemukan, mira strategis atau kerjasama ekonomi Timor Leste lebih dekat dengan negara-negara seperti Indonesia, Amerika, Australia dan China. Ini membuktikan bahwa kerjasama-kerjasama tersebut tidak berpengaruh dengan ekonomi Singapura, apalagi negara-negara tersebut merupakan rival Singapura dalam konteks global.

#### **4.2 SARAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya berfokus pada perbedaan Sikap Indonesia dan Singapura dan juga hanya memakai kaca mata neorealisme sebagai landasan teori. Maka tindak lanjut dari penelitian ini penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada para peneliti kedepan agar melakukan penelitian lebih komprehensif tentang tantangan, peluang dan prospek Timor Leste bergabung ASEAN; Respon anggota ASEAN tentang manfaat dan kerugian Timor Leste bergabung ASEAN. Karena pembahasannya lebih komprehensif dan mendalam, apalagi kajian mengenai hal ini masih jarang sehingga daya tawar penelitian dapat bermanfaat stake holder dan dapat memberikan sumbangsing bagi karya akademis sehingga penelitian dapat lebih inovatif dan variatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, R. (2013). *Para Pembrontak Bangsa*. Yogyakarta: Palapa.
- Antaranews. (2019, April 06). Dipetik April 28, 2019, dari <https://www.antaranews.com/infografis/821164/kekuatan-militer-indonesia>
- Araujo, B. D. (2014). *Timor Timur Gagalnya Sebuah Diplomasi*. 21: Indie Publishing.
- Azizah, N. (1992). *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia dalam Prospektif 4*. Jakarta: Rand McNally Pub. Co.
- BbcIndonesia. (2017, Juli 14). Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>
- BbcIndonesia. (2018, Desember 05). *Kelompok bersenjata Papua diburu menyusul pembunuhan pekerja proyek jembatan*. Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46435847>
- Bellows, T. J. (2009). Meritocracy and the Singapore. *Asian Journal of Political Science*, Vol. 17, No. 1, 28. Dipetik September 2019, dari [http://www.cafefle.org/texteskkkmg-icc\\_articles/13\\_Singapore\\_21p-Pol%20copie.pdf](http://www.cafefle.org/texteskkkmg-icc_articles/13_Singapore_21p-Pol%20copie.pdf)
- Belun. (2017). *Election Violence Education and Resolution*. Dili: The International Foundation for Electoral Systems (IFES). Dipetik April 2019, dari [http://www.ifes.org/sites/default/files/final\\_report\\_ever\\_17\\_oct.pdf](http://www.ifes.org/sites/default/files/final_report_ever_17_oct.pdf)
- Ben Dolven, R. M. (2012, Juli). *Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement*. Dipetik Juni 2019, dari fas.org: <https://fas.org/sgp/crs/row/R42585.pdf>
- Ben Dolven, R. M. (2012, Juli). *Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement*. Dipetik Juni 2019, dari fas.org: <https://fas.org/sgp/crs/row/R42585.pdf>
- Benu Bidani and Kaspar Richter. (2003). *Timor-Leste Kemiskinan Dalam Sebuah Bangsa Baru: Analisis Untuk Tindakan*. UNDP, 54.
- Bisogno, E. (2014, Maret). Global Study on Homicide 2013. (J. Gibbons, Penyunt.) *Division of Policy Analysis and Public Affairs*, 14.IV.1, 147. Diambil kembali dari [https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014\\_GLOBAL\\_HOMICIDE\\_BOOK\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)
- Booth, A. (2003). Decentralisation and Poverty Alleviation in Indonesia, *Environment and Planning C. Government and Policy*, Vol. 21, 181-202.
- CNN Indonesia. (2018). Dipetik 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181108173240-92-345053/soal-ratifikasi-dagang-pemerintah-langkahi-wewenang-dpr>
- Coelho, A. M. (2013). *Dua Kali Merdeka : Esei Sejarah Politik Timor Leste*. Jakarta: Diandra Primamitra.

- Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Dagun, M. S. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Department of Defence Australia. (2016). *Defence Economic Trends in the Asia-Pacific*. Dipetik Agsstud 2019, dari <http://www.defence.gov.au>: [http://www.defence.gov.au/dio/documents/DET\\_16.pdf](http://www.defence.gov.au/dio/documents/DET_16.pdf)
- Detik. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://finance.detik.com/industri/d-4294184/alasan-korsel-ajak-ri-buat-jet-tempur-bareng>
- Economist. (2018, Juni 21). *China has militarised the South China Sea and got away with it*. Diambil kembali dari <https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got-away-with-it>
- Ekon.go.id. (2018, November 18). Dipetik April 26, 2019, dari <https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-indonesia.4347.html>
- Failor, X. W. (2016). *Understanding Violence against Women and Children in Timor-Leste. Findings from the Nabilan Baseline Study*, 51. Dipetik April 2019, dari <http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/05/nabilan-main-report-screen-2016-06-01.pdf>
- Gao, C. (2018, August). *How does it stack up against its neighbors, from the small to the big? Does Western tech really provide the level of advantage it needs to defend itself?* Dipetik September 2019, dari Nationalinterest: <https://nationalinterest.org/blog/buzz/singapore-might-be-small-its-military-ready-fight-29097>
- Gomes, R. (2002). *East Timor's Socio-Economic Development Under Indonesia*. London: Tesis Doktorat, London South Bank University.
- Green Party. (2018, November 13). Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://greens.org.au/wa/magazine/show-support-west-papua>
- Hartiani, J. (2016). Dipetik April 27, 2019, dari <https://katadata.co.id/infografik/2016/06/06/indonesia-importir-senjata-ke-2-terbesar-asean>
- Hartiani, J. (2016, Juni 6). *Indonesia Importir Senjata Ke-2 Terbesar ASEAN*. Diambil kembali dari <https://katadata.co.id/infografik/2016/06/06/indonesia-importir-senjata-ke-2-terbesar-asean>
- Jaya, G. N. (2016, Agustus). Dipetik April 28, 2019, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-sebut-personel-polisi-di-ri-terbanyak-nomor-2-di-dunia.html>
- John Pike. (2016, September). *Armed Forces of Timor-Leste (F-FDTL)*. Dipetik Agustus 2019, dari globalsecurity: <https://www.globalsecurity.org/military/world/timor/f-ftdl.htm>
- Kapur, R. (2016, Oktober). *Is Timor-Leste Finally Ready to Join ASEAN?* Dipetik September 2019, dari thediplomat: <https://thediplomat.com/2016/10/is-timor-leste-finally-ready-to-join-asean/>
- Katadata. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/13/ekspor-kendaraan-tempur-indonesia-semester-i-2018-tumbuh-51>

- Kemala, A. N. (2018, November 11). *Indonesia Akan Meratifikasi Tujuh Perjanjian Perdagangan Internasional*. Dipetik 26 26, 2019, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/07/221600626/indonesia-akan-meratifikasi-tujuh-perjanjian-perdagangan-internasional>
- kemenkeu. (2019). *APBN 2019*. Dipetik September 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id>: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- kemenkeu. (2019). *APBN 2019*. Dipetik September 2019, dari [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kementerian Perdagangan. (2019, Juli). *Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang*. Dipetik Juli 2019, dari [kemendag.go.id](http://kemendag.go.id): <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=391>
- kemlu. (2019, September). *Fungsi Kementerian Luar Negeri*. Dipetik September 2019, dari <https://kemlu.go.id>: [https://kemlu.go.id/portal/i/read/14/halaman\\_list\\_lainnya/fungsi-kementerian-luar-negeri](https://kemlu.go.id/portal/i/read/14/halaman_list_lainnya/fungsi-kementerian-luar-negeri)
- Kompas. (2019). Dipetik April 27, 2019, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/26/063900226/maret-pt-pal-luncurkan-kapal-selam-rakitan-anak-bangsa>
- KORPRI Timor Timur. (1997). *Buku Dua Puluh Tahun Timor Timur*. Dili: Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur.
- Lancang Mekong Cooperation. (2016, Maret 23). *Sanya Declaration of the First Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Leaders' Meeting*. Dipetik Januari 12, 2019, dari Lancang Mekong Cooperation: [http://www.lmcchina.org/eng/zywj\\_5/t1513793.htm](http://www.lmcchina.org/eng/zywj_5/t1513793.htm)
- Loh, J. (2019, Juli). *The Singapore Army's upcoming 'realistic' urban training complex has smart targets that can 'shoot back' and retreat*. Dipetik September 2019, dari businessinsider: <https://www.businessinsider.sg/the-singapore-armys-upcoming-realistic-urban-training-complex-has-smart-targets-that-can-shoot-back-and-retreat/>
- Meixiani, L. (2019, Juli). *A-Smart in JV to build mixed development in Timor-Leste*. Dipetik September 2019, dari Businesstimes: <https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/a-smart-in-jv-to-build-mixed-development-in-timor-leste>
- Ministry of Foreign Affairs. (2019). *Vision, Mission, and Values*. Dipetik September 2019, dari <https://www.mfa.gov.sg>: <https://www.mfa.gov.sg/About-MFA/Vision-Mission-and-Values>
- Muhaimin. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://international.sindonews.com/read/1288966/40/indonesia-nomor-10-importir-senjata-terbesar-di-dunia-1520844422>
- Mustafa, A. (2014, Maret). *Singapore: Small state, big weapons buyer*. Dipetik September 2019, dari Aljazeera.: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/singapore-small-state-big-arms-purchases-2014320922191312.html>

- National Statistics Directorate (NSD). (2010). Timor-Leste Population and Housing Census 2010. *Analytical Report on Labour*, 12, 59. Dipetik April 2019, dari [http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2013/12/Labour\\_Force\\_Mono gr](http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2013/12/Labour_Force_Mono gr)
- Ndiaye, B. W. (1994, Juli). *UN Economic and Social Council*. Dipetik April 2019, dari [documents-dds-ny.un.org: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/145/62/PDF/G9414562.pdf?OpenElement](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/145/62/PDF/G9414562.pdf?OpenElement)
- Nirmala, M. (2013, Desember). *Staying one step ahead of terrorists*. Dipetik September 2019, dari Straitstimes: <https://www.straitstimes.com/singapore/staying-one-step-ahead-of-terrorists>
- Nn. (2005). *Islamic militant detained in Singapore under Internal Security Act*. Dipetik September 2019, dari AFX News: <https://www.forbes.com/feeds/afx/2005/11/11/afx2331703.html#75f0edad6cca>
- Nn. (2017, September). *Bangga! BUMN RI Garap Proyek Bandara Suai dan Oekusi di Timor Leste*. Dipetik Juni 2019, dari detik.com: <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-3665026/bangga-bumn-ri-garap-proyek-bandara-suai-dan-oekusi-di-timor-leste>
- Nn. (2017, September). *Singapore PM Lee Hsien Loong congratulates new Timor Leste counterpart Mari Alkatiri*. Dipetik Juni 2019, dari The Straitstimes: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/singapore-pm-lee-hsien-loong-congratulates-new-timor-leste-counterpart-mari-alkatiri>
- Nn. (2019, Juni). *PT Wijaya Karya Rampungkan Bandara Oecusse di Timor Leste*. Dipetik Juni 2019, dari mediabumn.com: <https://mediabumn.com/pt-wijaya-karya-rampungkan-bandara/>
- Parameswaran, P. (2018, Februari). *What's Behind Singapore's New Defense Budget Numbers?* Dipetik September 2019, dari TheDiplomat: <https://thediplomat.com/2018/02/whats-behind-singapores-new-defense-budget-numbers/>
- Pindad. (2018). Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.pindad.com/httpswwdailymailcoidjuruspindadgenjotkapasitaspropelan>
- Praditya, I. I. (2018, Januari). Dipetik April 27, 2019, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3289476/impor-senjata-melonjak-677-persen-pada-januari-2018>
- Putra, D. A. (2018, Juni 9). Dipetik Mei 5, 2019, dari <https://www.merdeka.com/uang/bps-catat-pdb-perkapita-indonesia-2018-sebesar-rp-56-juta.html>
- Reason, J. (1990). *Human Error*. Ashgate. ISBN 1-84014-104-2.
- Russell Searancke. (2009, May). *Commission to Meet on Sunrise*. Dipetik April 2019, dari [upstreamonline: https://www.upstreamonline.com/hardcopy/features/975552/russell-searancke](https://www.upstreamonline.com/hardcopy/features/975552/russell-searancke)
- Simanjuntak, R. A. (2016, Maret 24). *Pemerintah RI Diminta Tegas Sikapi Intimidasi Kapal China*. Diambil kembali dari <https://nasional.sindonews.com/read/1095395/14/pemerintah-ri-diminta-tegas-sikapi-intimidasi-kapal-china-1458785288>
- Stout, N. (2018, februari). *Infrastructure in Timor-Lest Growing According to Strategic Plan*. Dipetik Juni 2019, dari [borgenproject.org: https://borgenproject.org/infrastructure-in-timor-leste/](https://borgenproject.org/infrastructure-in-timor-leste/)

- Straittimes. (2016). <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/isis-videos-declare-war-on-malaysia-and-indonesia>. Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/isis-videos-declare-war-on-malaysia-and-indonesia>
- Swastia, S. A. (2016, Oktober). Diplomasi Timor Leste Bergabung Dalam Keanggotaan ASEAN. *JOM FISIP, Vol. 3 No. 2.*, 9. Dipetik Juni 2019, dari file:///C:/Users/asus/Downloads/11409-22177-1-SM.pdf
- Tempo. (2016, Agustus). Dipetik April 28, 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/795512/kekuatan-militer-indonesia-peringkat-keempat-asia>
- The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR). (2013). *The Final Report of The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR)*. (M. A. Rani Elsanti, Penyunt.) November, Jakarta: Gramedia.
- Timor-Leste Population and Housing Census. (2010). Analytical Report on Migration and Urbanization. *Migration and Urbanization Monograph*, 7, 59. Dipetik April 2019, dari [http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2013/12/Migration\\_Monograph.pdf](http://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2013/12/Migration_Monograph.pdf)
- UNDP. (2018). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. *UNDP*, 2. Dipetik April 2019, dari [http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr\\_theme/country-notes/TLS.pdf](http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/TLS.pdf)
- UNDP. (2018). *Human Development Report*. Dipetik April 2019, dari HDR UNDP: <http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>
- United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Population Fund (UNFPA). (2017). Analytical Report on Education. *Timor-Leste Population and Housing Census 2015*, 11, 4. Dipetik April 2018, dari <https://www.unicef.org/timorleste/reports/timor-leste-population-and-housing-census-2015>
- Walters, P. K. (2006, May). *Back for good*. Dipetik April 2019, dari theaustralian: <http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,19267564-28737,00.html>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Amerika: Addison-Wesley Company.
- Wei, w. C. (2019, Juli). *Straittimes*. Dipetik September 2019, dari Timor Leste urges Singapore to play bigger role in its development story: <https://www.straitstimes.com/business/timor-leste-urges-singapore-to-play-bigger-role-in-its-development-story>
- Wiryo, S. (2010, September 10). *Sengketa Indonesia-Malaysia*. Dipetik Mei 23, 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/01/03565049/sengketa.indonesia-malaysia?page=all>